



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, perlu untuk menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 151);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.



14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliaphaga*, *collocaliamaxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalialinchi*.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.



31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pendaftaran dan Pendataan;
2. Penetapan;
3. Penyetoran;
4. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
5. Pembukuan dan Pelaporan;
6. Keberatan dan Banding;
7. Penagihan;



8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; dan
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

**Pasal 3**

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk pula mengatur Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN KEPEGDA	
KADIS HUBKOMINFO	
KADIS PORABUDPAR	
KADIS DIK	
KADIS PENDAPATAN	<i>[Signature]</i>
KABAG KUMDANG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

*[Signature]*

**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

*[Signature]*

**EKKA PONTOH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 7**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya ,disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun pengeluarannya.

Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Memperhatikan dasar tersebut dan mengingat aturan pedoman pelaksanaan tentang pajak dan retribusi daerah belum ada serta pentingnya pedoman pengadministrasian pendapatan maka di pandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperlukan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel terutama dibidang pendapatan.

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah , Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain dengan penyesuaian pada Undang Undang Nomor. 28 Tahun 2009.



## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh SKPD untuk mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya. Dengan demikian terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh SKPD dalam pengadministrasian pengelolaan pajak daerah.

## **C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Urutan penyajian penyusunan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, yaitu:

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Penetapan
3. Penyetoran
4. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran
5. Pembukuan dan Pelaporan
6. Keberatan dan Banding
7. Penagihan
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Untuk memudahkan pemahaman, setiap system dan prosedur dari suatu kegiatan/subkegiatan disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. Pengertian  
Berisi penjelasan tentang prosedur yang diuraikan.
2. Pihak-pihak yang Terkait  
Berisi semua pihak-pihak yang terlibat dalam system dan prosedur dari suatu kegiatan. Uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.



3. **Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan**  
Berisi formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam system dan prosedur suatu kegiatan yang diuraikan.
4. **Prosedur**  
Merupakan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk menghasilkan data atau informasi yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan yang lainnya.
5. **Bagan Alur**  
Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang dilaksanakan dari awal sampai berakhirnya suatu kegiatan. Selain itu, juga menjelaskan jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta alur pendistribusian dokumen dari satu pihak/bagian kepada pihak/bagian lain yang terkait dalam suatu proses pelaksanaan system dan prosedur.

## **BAB II**

### **SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah Kabupaten Parigi Moutong mengatur tata cara urutan pelaksanaan pekerjaan administrasi perpajakan, dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada fungsi lain.

Sistem dan prosedur administrasi pajak pada Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan utama yang masing-masing akan di jelaskan berikut ini.

## **A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

Kegiatan Pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan Wajib Pajak (WP) baru dengan cara penetapan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah (*Official Assessment*) atau *Self Assessment* (dibayar sendiri oleh WP).

Sedangkan kegiatan Pendataan dilakukan untuk WP baru maupun untuk WP lama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan menggunakan salah satu metode tersebut (*Official Assessment* atau *Self Assessment*).

Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan penjelasan dibawah ini.

### **1. Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Penetapan Oleh Bupati (*Official Assessment*) atau Dibayar Sendiri (*Self Assessment*)**

#### **1) Pengertian**

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran wajib pajak dengan cara Penetapan oleh Bupati (*Official Assessment*) atau Dibayar Sendiri (*Self Assessment*).

#### **2) Pihak-pihak Yang Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam system dan prosedur pendaftaran WP baru adalah :

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, dan
- b. Wajib Pajak.

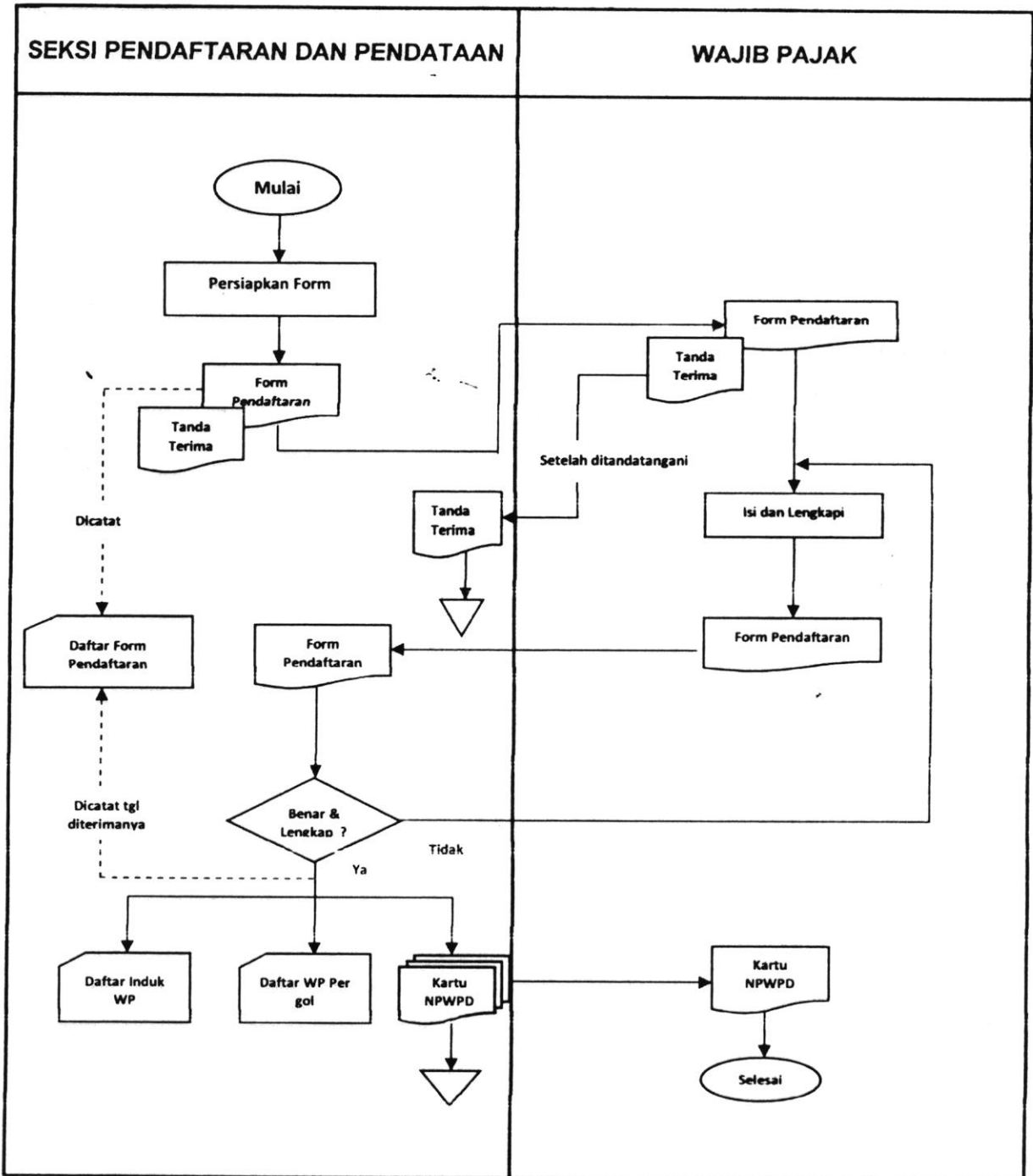
#### **3) Prosedur**

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendaftaran;
- b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran dan dibuatkan tandaterimanya;
- c. Setelah Formulir Pendaftaran diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani oleh WP atau yang diberikuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya;
- d. WP atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke DISPENDA;
- e. Berdasarkan formulir pendaftaran dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:



- (1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD;
  - (2) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DISPENDA;
- f. Setelah NPWPD dibuat rangkap dua, Asli diserahkan kepada wajib pajak dan tembusannya sebagai arsip.
- 4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan
- Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan ini antara lain:
    - a. Formulir Pendaftaran;
    - b. Kartu NPWPD;
    - c. Tanda Terima;
    - d. Daftar Formulir Pendaftaran;
    - e. Daftar Induk WP;
    - f. Daftar WP Per Golongan.

5) Bagan Alur





## 2. Kegiatan Pendataan Untuk Wajib Pajak Baru Dengan Cara Penetapan Oleh Bupati (Official Assessment)

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak baru secara penetapan oleh Bupati atau secara *Official Assessment*.

### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam system dan prosedur pendataan WP baru adalah:

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, dan
- b. Wajib Pajak.

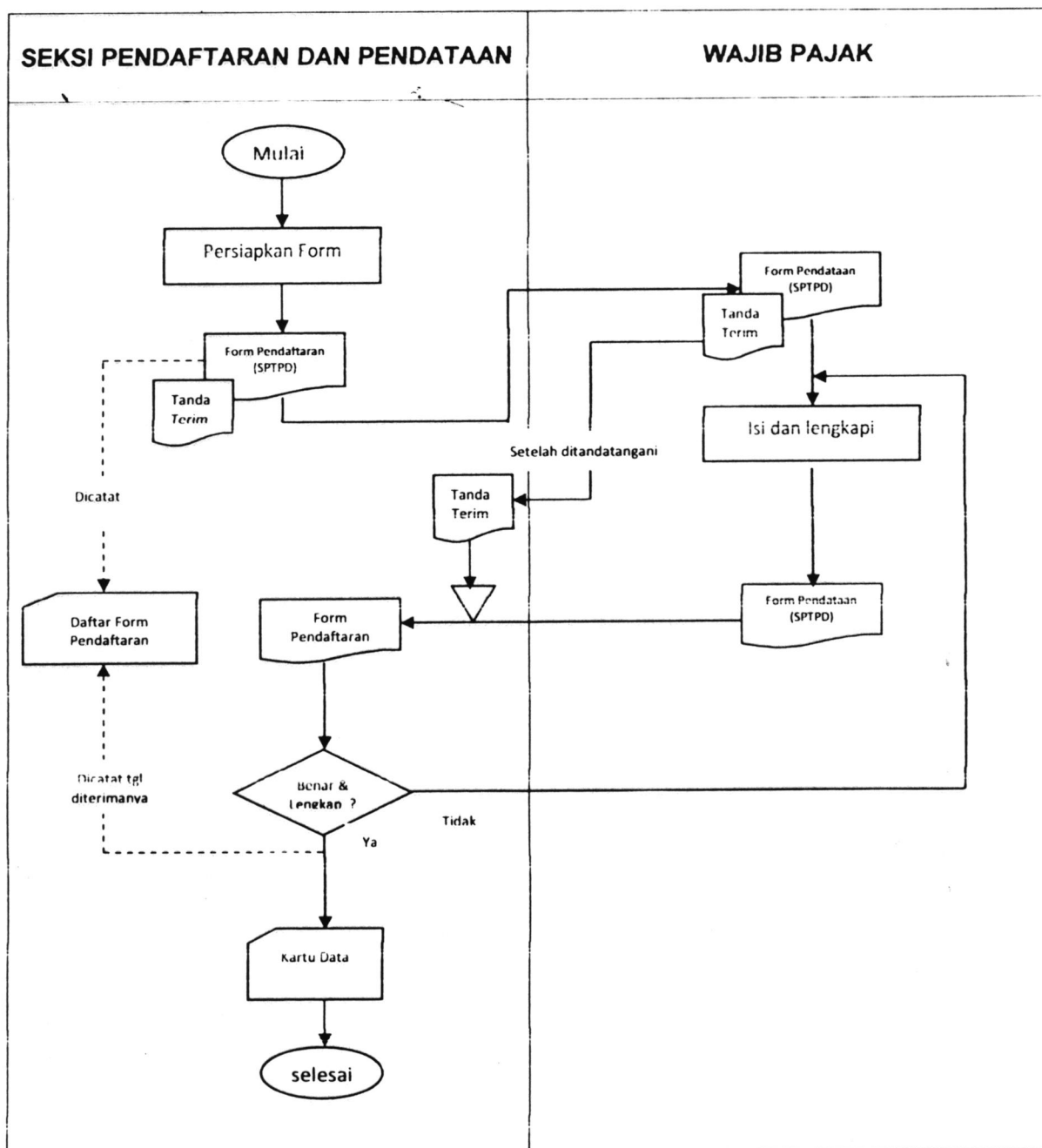
### 3) Prosedur

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah /SPTPD );
- b. Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP setelah di catat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tandaterimanya;
- c. Setelah Formulir Pendataan (SPTPD )diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani oleh WP atau yang di berkuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya;
- d. WP atau yang di berkuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke DISPENDA;
- e. Berdasarkan formulir pendataan dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
  - (1) Apabila pengisiannya telah benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tangga lpenerimaan;
  - (2) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DISPENDA;
- f. Mencatat data pajak daerah dalam kartu Data yang selanjutnya dilakukan proses penetapan.

4) Formulir dan Daftar /Buku yang Di gunakan

- a. Formulir Pendataan(SPTPD);
- b. Kartu Data;
- c. Tanda Terima
- d. Daftar SPTPD.

5) Bagan Alur





### 3. Kegiatan Pendataan WP Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Penetapan Bupati (*Official Assessment*)

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD secara penetapan oleh Bupati atau secara *Official Assessment*.

#### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam system dan prosedur pendaftaran WP Lama adalah:

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, dan
- b. Wajib Pajak.

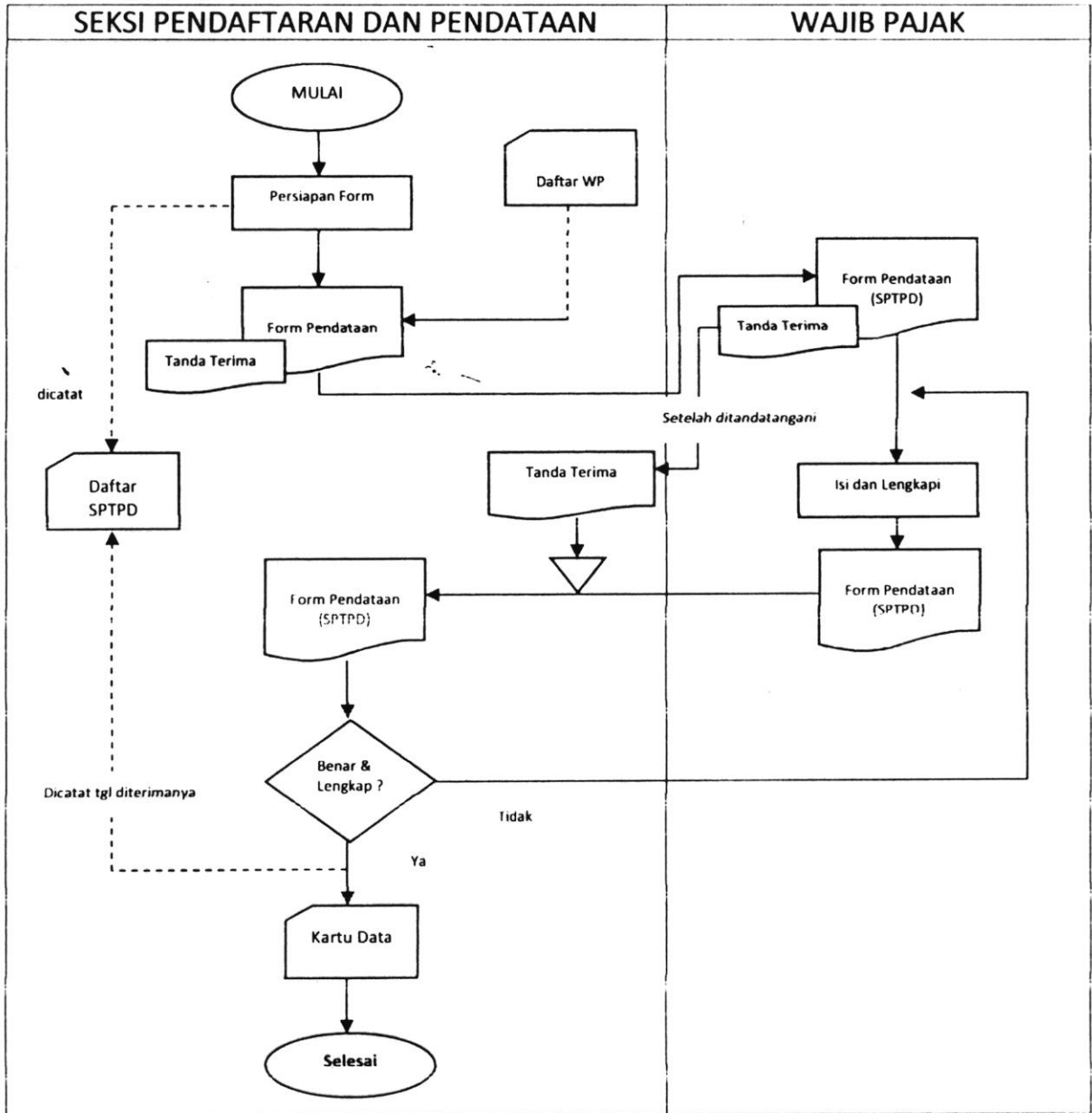
#### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan Daftar WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD);
- b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah di catat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;
- c. Setelah Formulir Pendaftaran diterima WP dan tanda terima telah di tanda tangani oleh WP atau yang di berikuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya;
- d. WP atau yang diberikuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke DISPENDA;
- e. Berdasarkan SPTPD dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
  - (1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
  - (2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) di kembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DISPENDA;
- f. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya di gunakan sebagai sumber data untuk proses penetapan

#### 4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

- a. Formulir Pendataan (SPTPD);
- b. Kartu Data;
- c. Tanda Terima;
- d. Daftar SPTPD;

5) Bagan Alur



4. Kegiatan Pendataan WP Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Di bayar Sendiri (*SelfAssessment*)

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD dengan cara dibayar sendiri atau secara *Self Assessment*.

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam system dan prosedur pendaftaran WP Lama adalah:

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, dan
- b. Wajib Pajak.

3) Prosedur

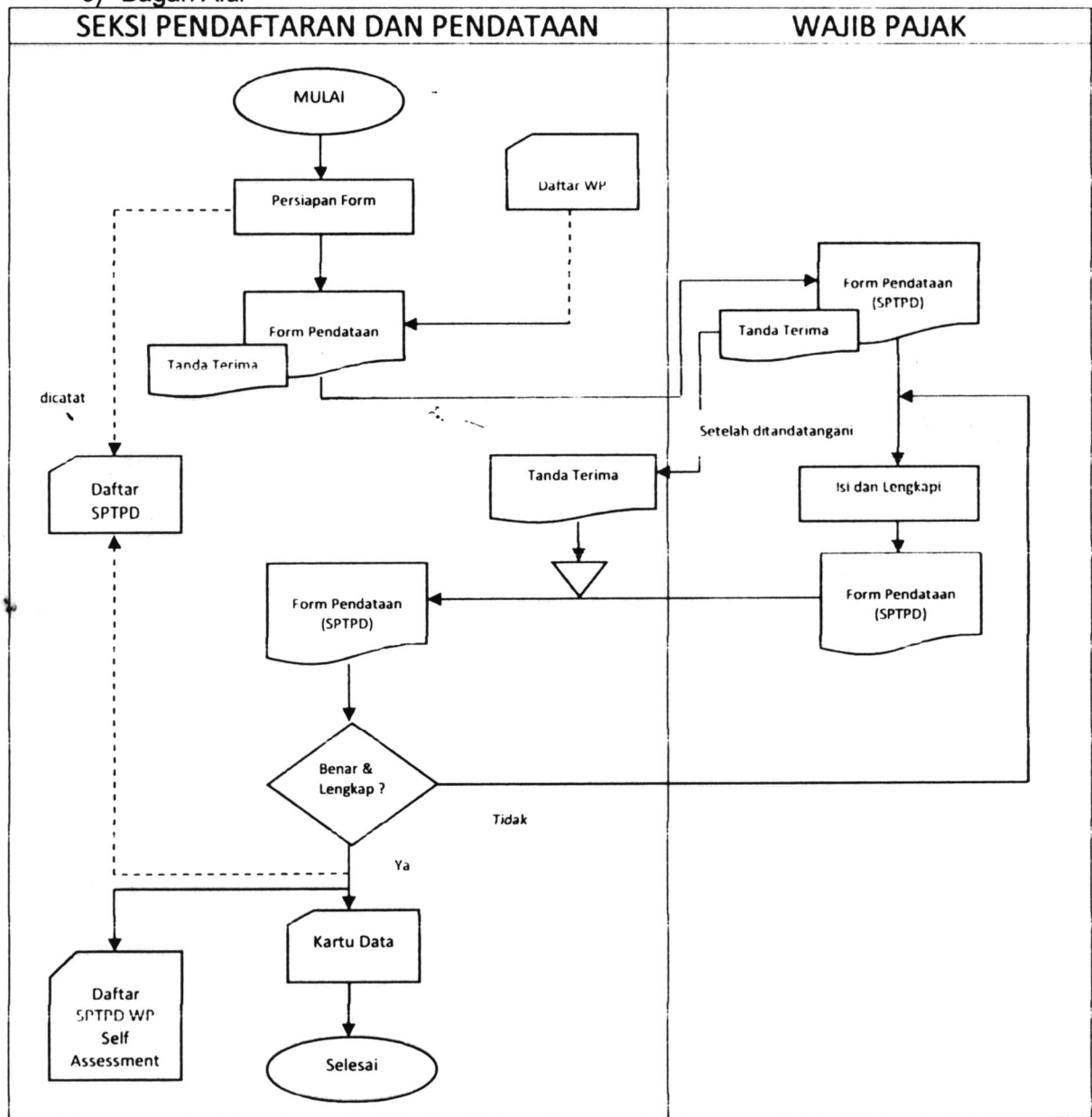
- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempersiapkan Formulir pendataan (SPTPD);
- b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;
- c. Setelah Formulir Pendataan diterima WP dan tanda terima telah di tanda tangani oleh WP atau yang di berkuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya;
- d. WP atau yang di berkuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan termasuk Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran dan Rekapitulasi Penerimaan perJenis Layanan, dan menyerahkan kembali ke DISPENDA;
- e. Berdasarkan SPTPD dari WP, Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
  - (1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan di beri tanda dan tanggal penerimaan;
  - (2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada WP untuk melengkapi;
- f. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar SPTPDWP *Self Assessment*.

4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

- a. Formulir SPTPD
- b. Kartu Data
- c. Tanda Terima
- d. Daftar SPTPD
- e. Daftar SPTPDWP *Self Assessment*



5) Bagan Alur



## B. PENETAPAN

Kegiatan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP dapat melalui cara penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah (*Official Assessment*) atau *Self Assessment*. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan uraian di bawah ini.

### 1. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Penetapan Bupati (*Official Assessment*)

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP dengan cara penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah (*Official Assessment*).

#### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Seksi Verifikasi dan Validasi;
- b. Wajib Pajak;
- c. Seksi Penetapan dan Penagihan.

#### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan Kartu Data dari Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;
- b. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah, di terbitkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru dan mencatatnya kedalam Daftar SKPD/SKPDT;
- c. SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala DISPENDA dan Daftar SKPD/SKPDT di tandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan di siapkan tanda terimanya. SKPD/SKPDT di buat rangkap 5(lima), dengan distribusi sebagai berikut:
  - (1) Asli untuk Wajib Pajak;
  - (2) Tembusan masing-masing untuk Seksi Verifikasi dan Validasi, dan Seksi Penetapan dan Penagihan.
  - (3) Arsip.

- d. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan tembusan SKPD/SKPDT kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli SKPD/SKPDT disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;
- e. Setelah Asli SKPD/SKPDT di terima wajib pajak dan tanda terima di tanda tangani, Seksi Penetapan dan Penagihan mengarsipkannya. Daftar penetapan ditembuskan kepada Bendahara Penerima;
- f. Apabila SKPD/SKPDT yang di terbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) tiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

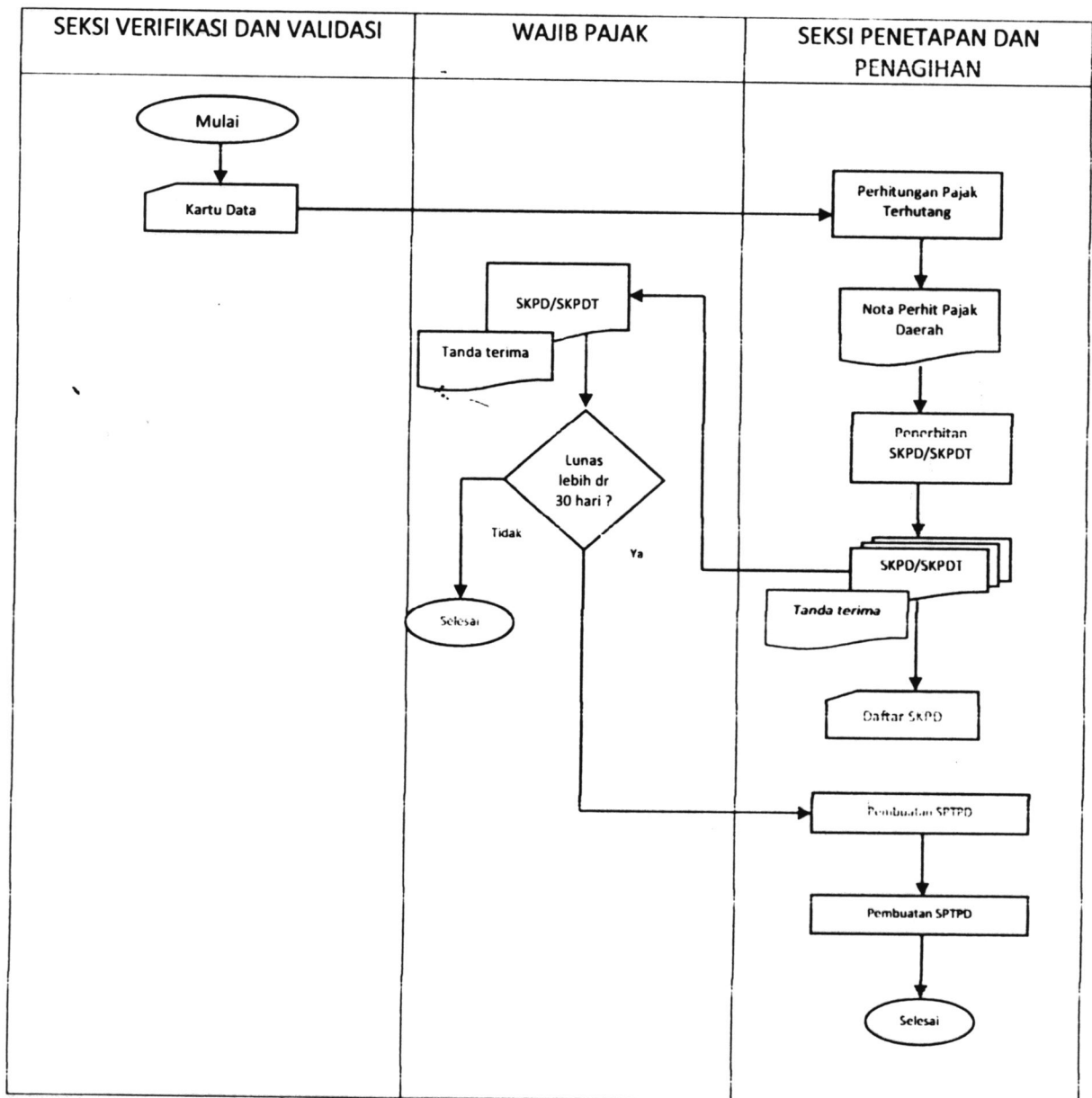
4) Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Kartu Data;
- b. Nota Perhitungan Pajak Daerah
- c. SKPD/SKPDT
- d. Tanda Terima;
- e. Daftar SKPD/SKPDT
- f. Surat Tagihan Pajak Daerah.



5) Bagan Alur



2. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Dibayar Sendiri atau *Self Assessment*

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP dengan cara dibayar sendiri (*Self Assessment*).

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - b. Wajib Pajak;
  - c. Seksi Verifikasi dan Validasi
  - d. Bendahara Penerima.
- 3) Prosedur
- a. Setelah WP membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD, di catat dalam Kartu Data;
  - b. Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data;
  - c. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah tersebut dibuat surat ketetapannya yaitu:
    - (1) Jika Pajak terhutang kurang atau tidak dibayar maka di terbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
    - (2) Jika tidak terdapa selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
    - (3) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
    - (4) Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terhutang maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - d. Setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB);
  - e. Surat Ketetapan di tandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala DISPENDA, dan Daftar Sura Ketetapan tersebut ditanda-tangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah. Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT) buat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:
    - (1) Asli untuk wajib pajak;
    - (2) Tembusan masing- masing untuk Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Verifikasi dan Validasi dan Seksi Penetapan dan Penagihan.
    - (3) Arsip.

- f. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan tembusan SKPDKB, SKPDN, dan KPDKBT kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;
- g. Setelah SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT Asli diterima wajib pajak dan tanda terima telah ditandatangani, Seksi Penetapan dan Penagihan mengarsipkannya;
- h. Sanksi administrasi atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT berupa kenaikan pokok dan bunga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- i. Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT diterbitkan, WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dengan menerbitkan STPD.

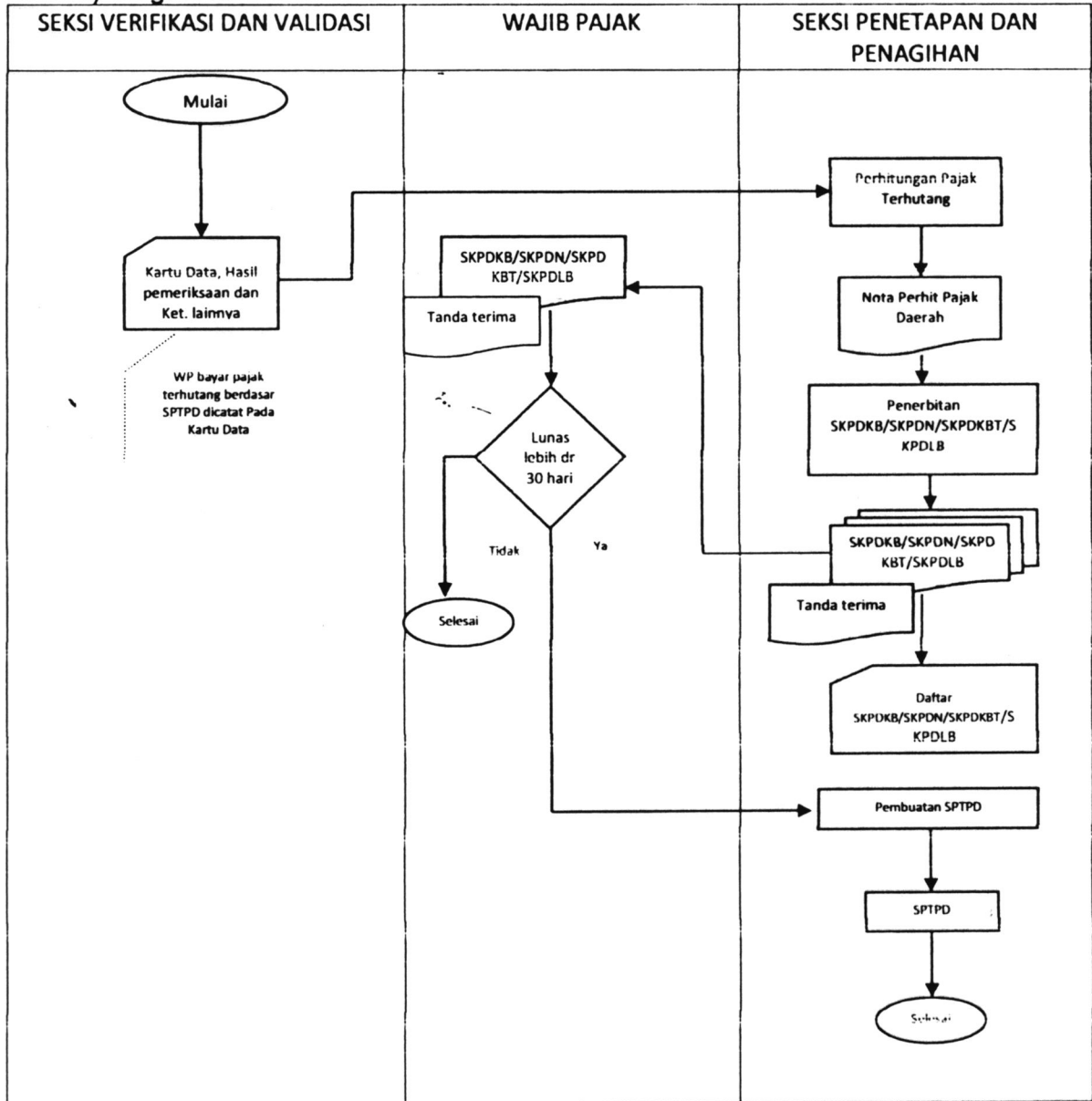
4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Surat Teguran untuk memasukan SPTPD
- b. Kartu Data
- c. Laporan Pemeriksaan
- d. Nota Perhitungan Pajak Daerah
- e. SKPD
- f. SKPDN
- g. SKPDKB
- h. SKPDKBT
- i. STPD
- j. SKPDLB dan
- k. Daftar Surat Ketetapan



5) Bagan Alur



### 3. Kegiatan Penetapan Secara Jabatan

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan penetapan pajak terutang secara jabatan. Hal ini dilakukan karena wajib pajak tidak memenuhinya untuk mengisi SPTPD.

#### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain yaitu:

- a. Seksi Verifikasi dan Validasi;
- b. Wajib Pajak;
- c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan

#### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan kartu data dari hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain karena SPTPD tidak di sampaikan dan telah diberikan surat teguran untuk memasukkan SPTPD oleh Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi Penetapan dan penagihan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;
- b. Atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah, Seksi Penetapan dan Penagihan menerbitkan SKPD/SKPKB dan dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan;
- c. SKPD/SKPKB di tandatangi oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala DISPENDA. Daftar Surat Ketetapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah. Surat Ketetapan (SKPD dan SKPKB) dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:
  - (1) Asli untuk wajib pajak;
  - (2) Tembusan masing-masing untuk seksi pendaftaran dan Pendataan, Seksi Verifikasi dan Validasi dan Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - (3) Arsip di sampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;
- d. Setelah Asli SKPD/SKPKB diterima wajib pajak dan tanda terima telah ditanda tangani, Seksi Penetapan dan Penagihan mengarsipkannya;
- e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 15 (limabelas) hari dan telah di tegur tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga di hitung dari pajak

yang kurang atau terlambat dibayar runtuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak;

- f. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi dan pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Sanksi administrasi atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB, berupa kenaikan pokok dan bunga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

- g. Apabila SKPD/SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo yaitu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD.

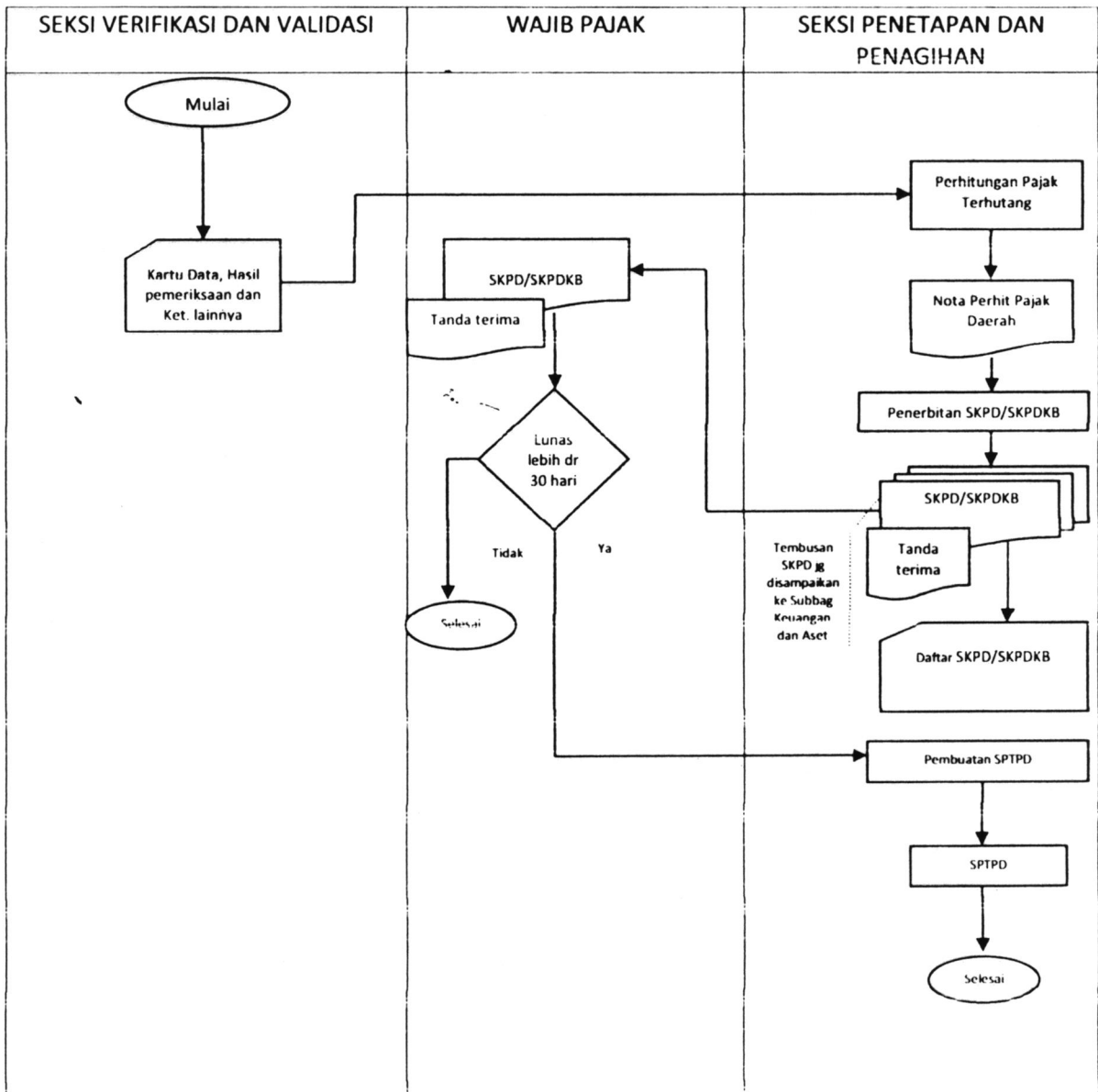
#### 4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD
- b. Kartu Data
- c. Tanda Terima
- d. Laporan Pemeriksaan
- e. Nota Perhitungan Pajak Daerah
- f. SKPD
- g. SKPDKB
- h. STPD;
- i. Daftar Surat Ketetapan dan
- j. Daftar Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD/SPTRD



5) Bagan Alur



**C. PENYETORAN**

Kegiatan penyetoran pajak oleh WP atau pihak yang di berkuasa melalui BUD/Kas Daerah. Sistem dan prosedur kegiatan tersebut diuraikan berikut ini:

**1. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD /Kas Daerah untuk Self Assessment**

**1) Pengertian**

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak langsung kerekening BUD/Kas Daerah pada Bank.

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini adalah:

- a. Wajib Pajak;
- b. Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Kasubag Keuangan dan Aset
- e. Seksi Penetapan dan Penagihan.

3) Prosedur

- a. Kas Daerah /Bank menerima setoran uang pajak daerah dari WP dengan media penyeteroran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank Slip Setoran . SSPD dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:
  - (1) Asli untuk wajib pajak;
  - (2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan /BKP;
  - (3) Seksi Verifikasi dan Validasi;
  - (4) Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - (5) Arsip.
- b. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank /slip setoran di validasi dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah /pihak bank, BUD/ Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran kepada wajib pajak. Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk Bendahara Penerimaan /BKP dilampiri Bukti Setoran Bank/Slip Setoran.
- c. Berdasarkan media penyeteroran (SSPD) dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran yang telah divalidasi dan dicap oleh BUD/Kas Daerah, Bendahara Penerimaan /BKP mencatat setoran tersebut dalam Register STS/SSPPD, dan Buku Penerimaan dan Penyeteroran .Buku Penerimaan dan Penyeteroran dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:
  - (1) Asli sebagai arsip
  - (2) Tembusan masing-masing untuk, Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi Verifikasi dan Validasi serta Seksi Penetapan dan Penagihan.
- d. Bendahara Penerimaan /BKP secara periodik (bulanan) membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif kepada Kepala DISPENDA dan LPJ Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala DISPENDA. LPJ Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada:

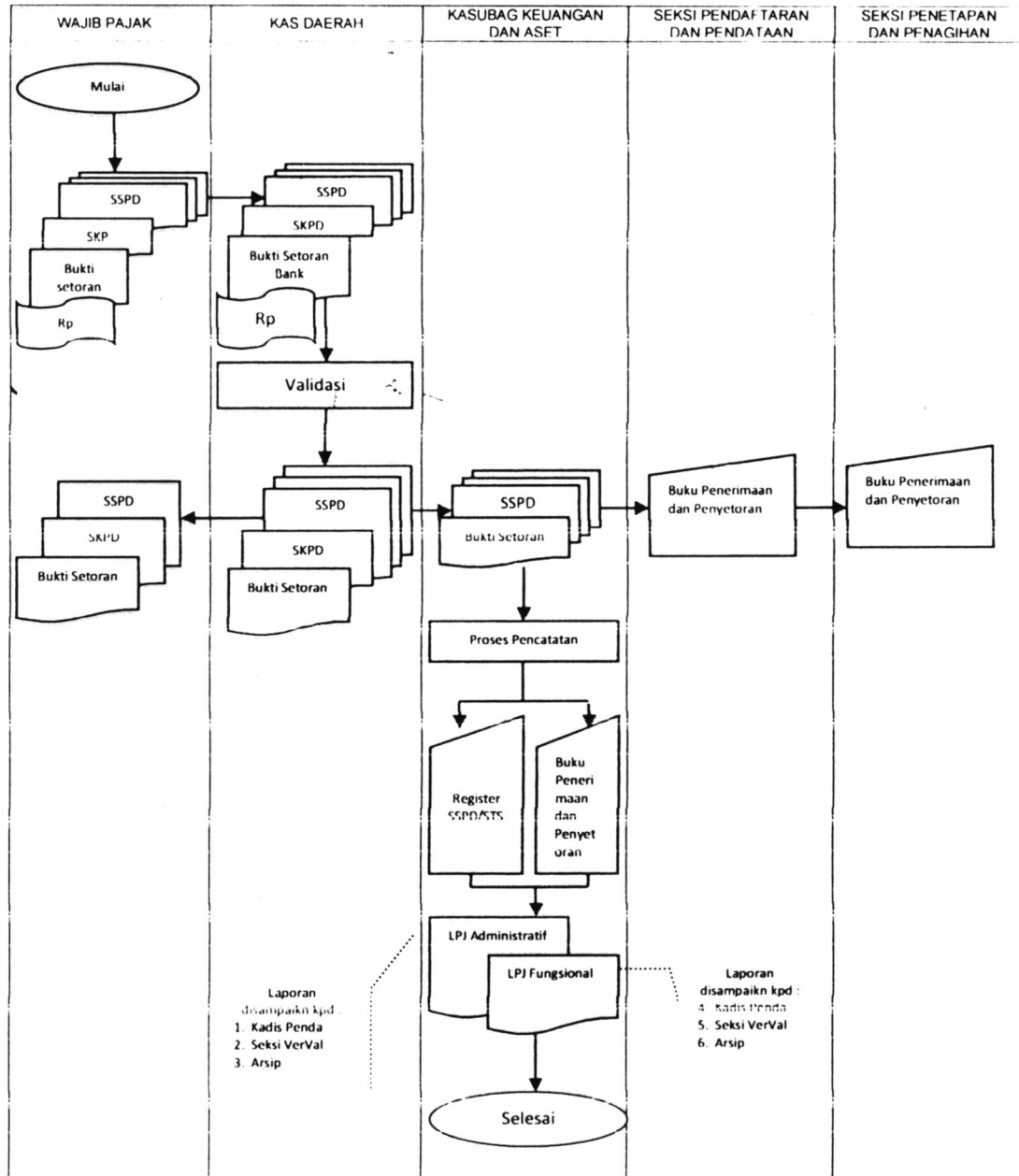
- (1) Kasubag Keuangan dan Aset;
- (2) Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah); dan
- (3) Arsip

4) Formulir dan Daftar yang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain :

- a. SSPD;
- b. Register STS/SSPD;
- c. Buku Penerimaan dan Penyetoran;
- d. LPJ Administratif;
- e. LPJ Fungsional.

5) Bagan Alur



## 2. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD/Kas Daerah untuk *Official Assessment*

### 1) Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak langsung ke rekening BUD/Kas Daerah di Bank

### 2) Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini adalah:

- a. Wajib Pajak;
- b. Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah;
- c. Bendahara Penerimaan /BKP;
- d. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
- e. Seksi Pendaftaran dan Penagihan.

### 3) Prosedur

a. Kas Daerah /Bank menerima setoran uang pajak daerah dari WP di sertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta Bukti Setoran Bank /Slip Setoran. SSPD dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:

- (1) Asli untuk wajib pajak;
- (2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan /BKP, Seksi Verifikasi dan Validasi;
- (3) Arsip.

b. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank/ slip etoran dan dicap oleh pihak bank, BUD/Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank Slip Setoran kepada wajib pajak. Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk Bendahara Penerimaan /BKP dilampiri Bukti Setoran Bank / Slip Setoran.

c. Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan Bukti Setoran Bank /Slip Setoran yang telah di cap oleh BUD /Kas Daerah, Bendahara Penerimaan /BKP mencatat setoran tersebut dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran dan Register STS/ SSPD. Buku Pembantu Penerimaan dan Penyetoran dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:

- a. Asli sebagai arsip;
- b. Tembusan masing-masing untuk Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi Pendaftaran dan Pendataan serta Seksi Penetapan dan Penagihan.



d. Bendahara Penerimaan /BKP secara periodik (bulanan) membuat Laporan Pertanggung jawaban(LPJ) Administratif kepada Kepala Dispenda dan LPJ Fungsional yang di tandatangani oleh Kepala DISPENDA. LPJ Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada:

- (1) BPPKD;
- (2) Kasubag Keuangan dan Aset
- (3) Arsip

4) Formulir dan Daftar yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- (1) SSPD (DPD-12);
- (2) Register STS/SSPD;
- (3) Buku Penerimaan danPenyetoran;
- (4) LPJ Administratif;
- (5) LPJ Fungsional

#### **D. PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak (WP) dapat memohon angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang akan diuraikan dibawah ini.

##### **1. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran**

###### **1) Pengertian**

Sistem dan prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan angsuran pembayaran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak dan pemberian persetujuan atau penolakan dari Kepala DISPENDA.

###### **2) Pihak-pihak Yang Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Wajib Pajak,
- b. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- c. Kepala Bidang Pajak Daerah;
- d. Kepala DISPENDA;

###### **3) Prosedur**

- a. Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala DISPENDA menerima Surat Permohonan Angsuran dari wajib pajak dan selanjutnya di disposisi ke Seksi Penetapan dan Penagihan dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Angsuran;
- b. Setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian keputusan persetujuan /penolakan permohonan angsuran oleh Kepala DISPENDA;
- c. Seksi Penetapan dan Penagihan menyampaikan hasil penelitian dan surat permohonan angsuran kepada Kepala DISPENDA melalui Kepala Bidang Pajak Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- d. Apabila Kepala DISPENDA tidak menyetujui permohonan tersebut, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran. Surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli diserahkan kepada wajib pajak dan tembusan sebagai arsip.

- e. Apabila Kepala DISPENDA menyetujui permohonan tersebut, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat Surat Perjanjian Angsuran dan dimintakan tandatangan kepada Kepala DISPENDA. Surat perjanjian angsuran dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli untuk wajib pajak dan satu tembusan untuk arsip.
  - f. Selanjutnya di catat dalam Daftar Surat Perjanjian Angsuran dan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi kepada Seksi Verifikasi dan Validasi, serta satu tembusan untuk arsip.
  - g. Seksi Penetapan dan Penagihan menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran kepada WP dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada pihak-pihak yang terkait.
- 4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Di gunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain.

- a. SSPD;
- b. Surat Permohonan Angsuran;
- c. Surat Perjanjian Angsuran;
- d. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran;
- e. Buku Register Permohonan Angsuran;
- f. Daftar Surat Perjanjian Angsuran.



## 2. Kegiatan Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan penundaan pembayaran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak dan pemberian persetujuan atau penolakan dari Kepala DISPENDA.

### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur ini terdiri dari:

- a. Wajib Pajak;
- b. Kepala DISPENDA;
- c. Kepala Bidang Pajak Daerah;
- d. Seksi Penetapan dan Penagihan

### 3) Prosedur

- a. Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala DISPENDA menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari wajib pajak dan selanjutnya di disposisi ke Seksi Penetapan dan Penagihan dan di catat dalam Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran;
- b. Setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian keputusan persetujuan/penolakan penundaan pembayaran oleh Kepala DISPENDA;
- c. Seksi Penetapan dan Penagihan menyampaikan hasil penelitian dan surat permohonan penundaan kepada Kepala DISPENDA untuk mendapatkan keputusan.
- d. Apabila Kepala DISPENDA tidak menyetujui permohonan tersebut, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran. Surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli diserahkan kepada wajib pajak dan tembusan sebagai arsip.
- e. Apabila Kepala DISPENDA menyetujui permohonan tersebut, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat surat persetujuan penundaan pembayaran dan dimintakan tandatangan kepada Kepala DISPENDA. Selanjutnya dicatat dalam Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.  
Surat persetujuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli untuk wajib pajak dan satu tembusan untuk arsip.  
Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan distribusi untuk Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi Penetapan dan Penagihan serta satu tembusan untuk arsip.

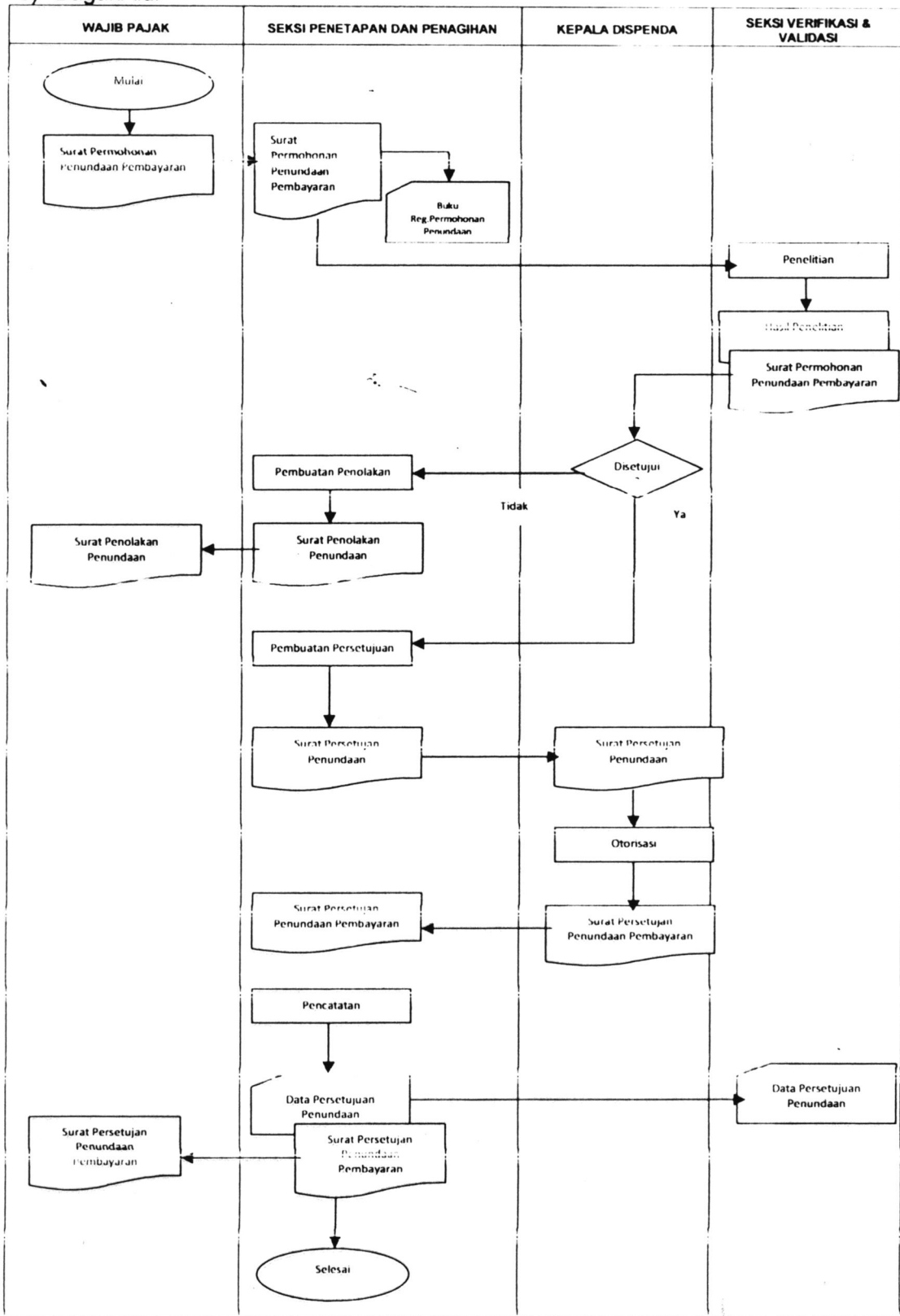


f. Seksi Penetapan dan Penagihan menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran /Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada WP dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

- a. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran,
- b. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
- c. Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran,
- d. Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran:
- e. Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.

5) Bagan Alur



## E. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Kegiatan pembukuan dan pelaporan merupakan fungsi penting dalam pengendalian system dan prosedur ini. Pembukuan dan pelaporan dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi lain agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 1. Kegiatan Pembukuan Penetapan

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan dalam membukukan atau mencatat penetapan pajak daerah berdasarkan dokumen penetapan yang ada.

#### 2) Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan system dan prosedur ini, antara lain:

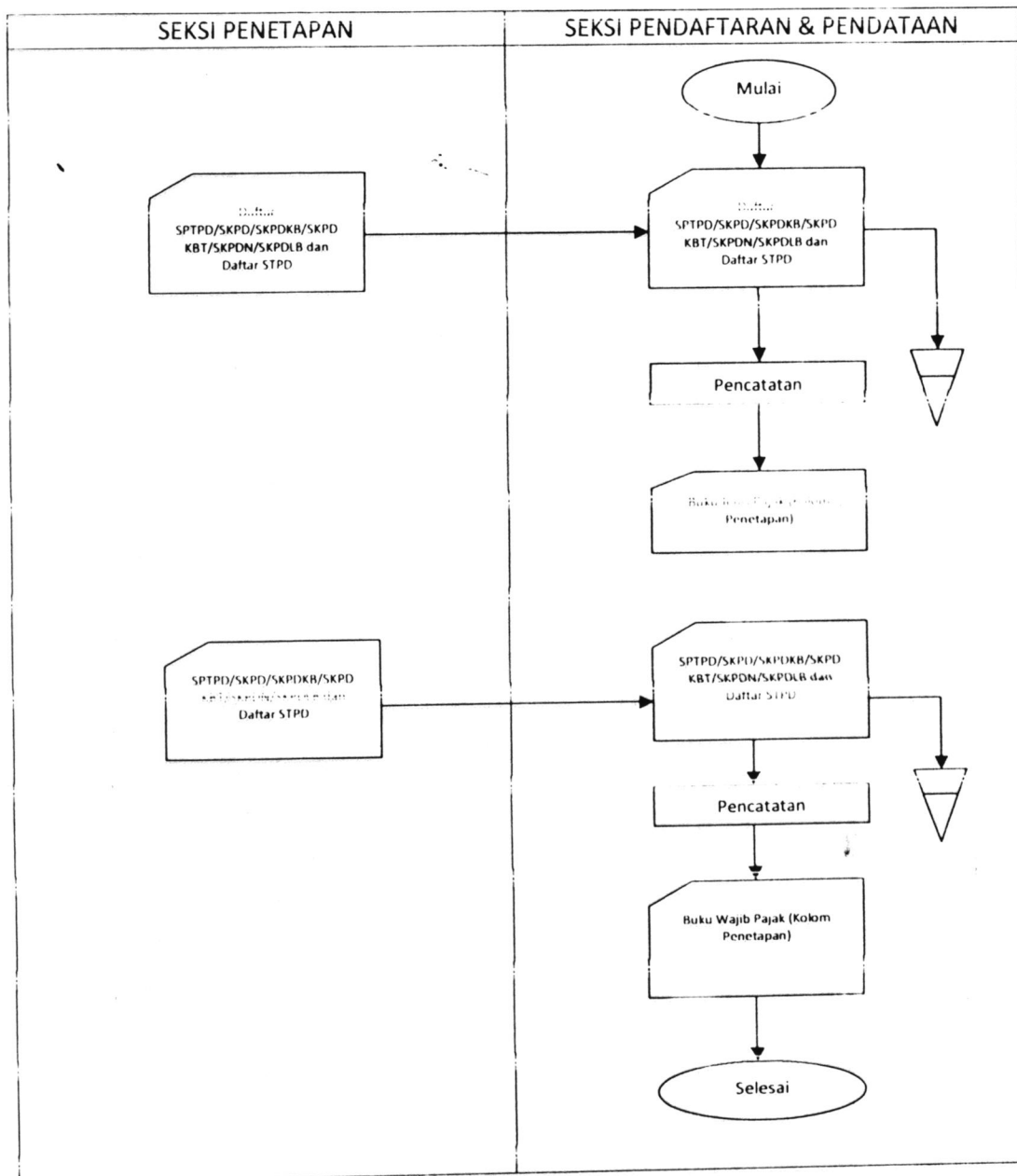
- a. Seksi Penetapan dan Penagihan
- b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

#### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan Daftar SPTPD WP *Self Assessment*, Daftar SKPD, Daftar SKPDKB, Daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar SKPD, Daftar STPD, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mencatat data pajak ke dalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia;
  - b. Berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mencatat data pajak ke dalam Buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD dari WP masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia;
  - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan member nomor urut file.
- #### 4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Di gunakan
- Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. SKPD
- b. SKPDN
- c. SKPDKB
- d. STPDKBT
- e. STPD

- f. SKPDLB
  - g. Daftar SPTPD WP *Self Assessment*
  - h. Daftar Surat Kelelapan
  - i. Buku Jenis Pajak
  - j. Buku WP
- 5) Bagan Alur



## 2. Kegiatan Pembukuan Penerimaan

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan dalam membukukan atau mencatat penyetoran pajak daerah berdasarkan dokumen penyetoran yang ada.

### 2) Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, antara lain:

- a. Seksi Verifikasi dan Validasi,
- b. Seksi Penetapan dan Penagihan.

### 3) Prosedur

- a. Seksi Verifikasi dan Validasi mencatat realisasi penyetoran pajak daerah kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada Kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar:

- (1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
- (2) Daftar Bukti Pemindah bukuan.

- b. Selanjutnya berdasarkan SSPD dan Bukti Pemindah bukuan yang telah disahkan oleh Seksi Verifikasi dan Validasi mencatat ke dalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dari WP masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia;

- c. Mengarsip /menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file.

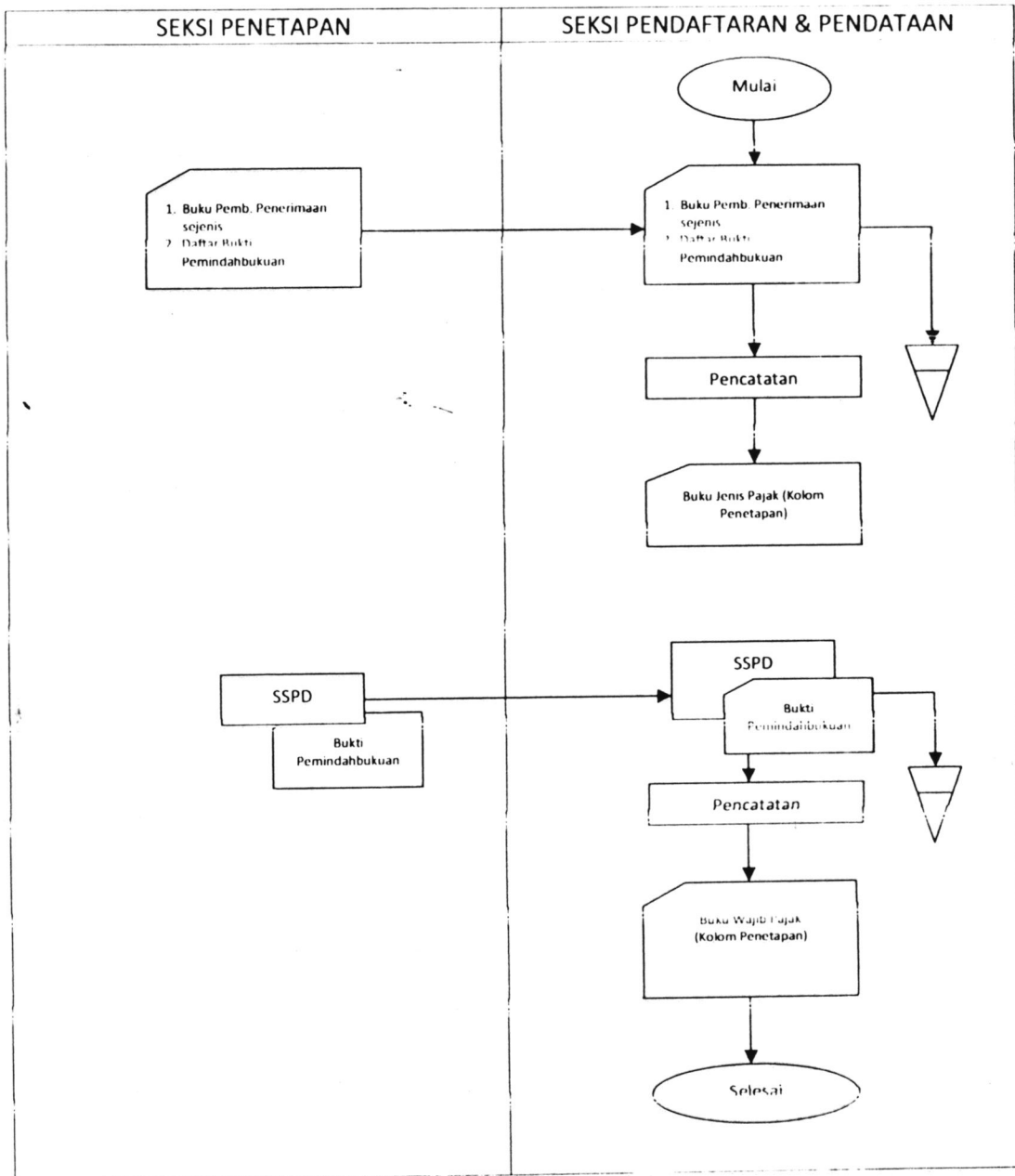
### 4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain.

- a. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD
- b. Bukti Pemindah bukuan
- c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
- d. Daftar Bukti Pemindah bukuan



5) Bagan Alur



### 3. Kegiatan Pelaporan

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan pelaporan yang Harus dilakukan atas pembukuan ketetapan pajak daerah dan penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak berdasarkan dokumen yang ada

#### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

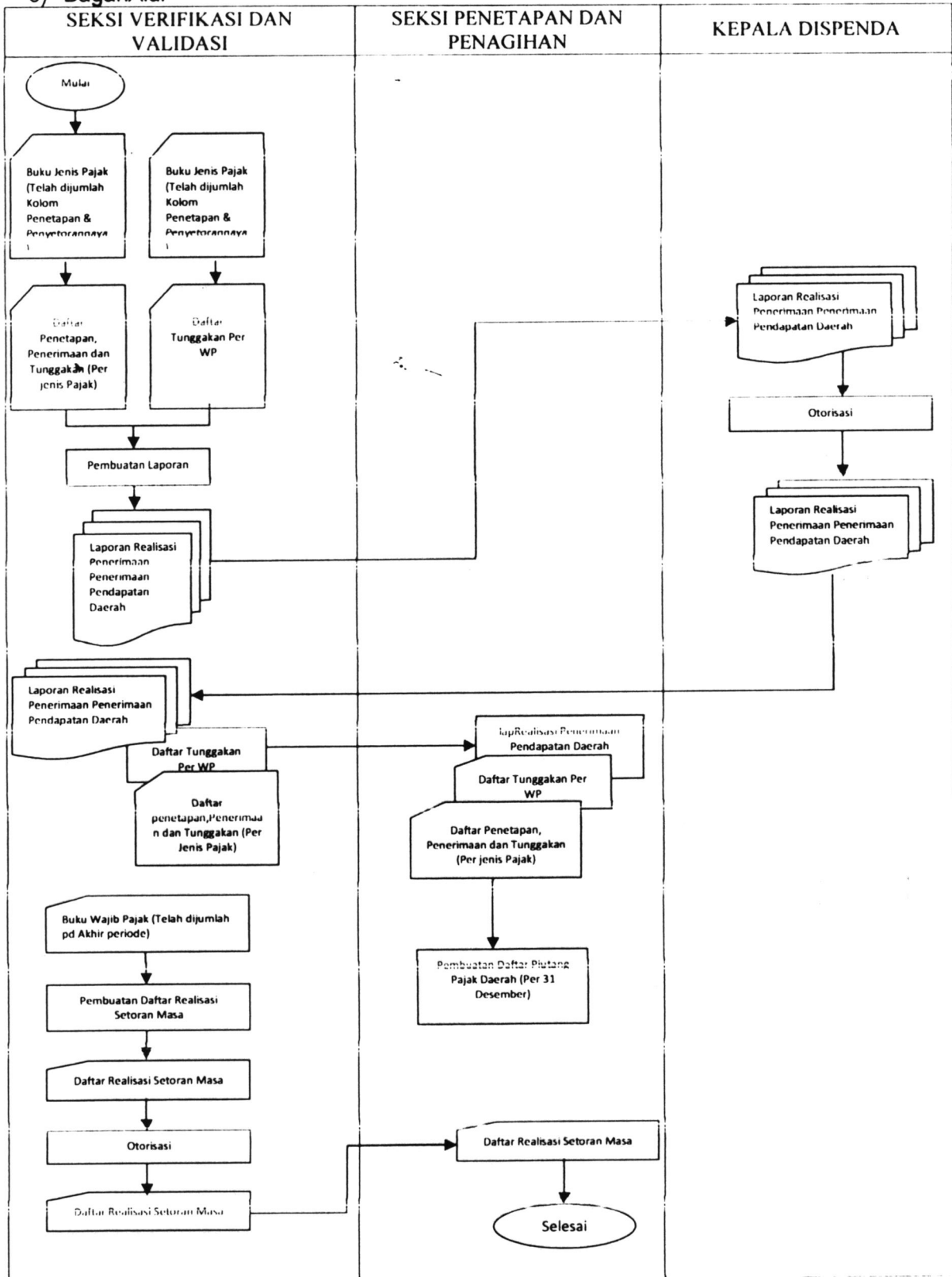
- a. Seksi Verifikasi dan Validasi,
- b. Seksi Penetapan dan Penagihan
- c. Kepala DISPENDA;

#### 3) Prosedur

- a. Seksi Verifikasi dan Validasi membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya;
- b. Selanjutnya Seksi Verifikasi dan Validasi membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya;
- c. Berdasarkan Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak Daerah dan Daftar Tunggakan per WP ,Seksi Verifikasi dan Validasi membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah. Laporan dibuat 4 (empat) rangkap;
- d. Menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kepala DISPENDA untuk diotorisasi /ditandatangani;
- e. Seksi Verifikasi dan Validasi mendistribusikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak serta Daftar Tunggakan per WP kepada:
  - (1) Seksi Penetapan dan Penagihan,
  - (2) Kasubag Keuangan dan Aset
  - (3) Arsip.

- f. Petugas pada Seksi Verifikasi dan Validasi membuat Daftar Realisasi Setoran Masa pada akhir periode masa atas dasar Buku WP yang telah dijumlah pada akhir periode. Daftar ini dibuat rangkap 3 (dua) dengan distribusi untuk Kasubag Keuangan dan Aset serta Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - g. Mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (*self assessment*) kepada Kepala Bidang Pajak Daerah untuk ditandatangani dan disahkan;
  - h. Mendistribusikan Daftar Realisasi Setoran Masa (*SelfAssessment*) kepada Seksi Penetapan dan Penagihan serta satu tembusan sebagai arsip.
- 4) Formulir dan Daftar Buku yang Digunakan
- Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain.
- a. Formulir Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
  - b. Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggalan perjenis
  - c. Daftar Tunggalan per WP
  - d. Daftar Realisasi Setoran Masa
  - e. Buku Jenis Pajak
  - f. Buku WP

5) Bagan Alur



## F. KEBERATAN DAN BANDING

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya. Sedangkan Apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 1. Kegiatan Penyelesaian Keberatan

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas ketetapan pajak daerah yang terutang. Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahas aIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak angga surat ketetapan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapa dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak.

#### 2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Wajib Pajak;
- b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- d. Kepala DISPENDA;
- e. Bupati;



3) Prosedur

- a. Seksi Penetapan menerima Surat Permohonan Keberatan dari WP dan mencatatnya ke dalam Buku Register. Surat Permohonan Keberatan;
- b. Setelah itu, Seksi Penetapan meneliti kelengkapan permohonan keberatan WP, dan dilakukan penelitian kembali, kemudian dibuat Laporan Hasil Penelitian;
- c. Seksi Penetapan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat permohonan keberatan kepada Kepala DISPENDA untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak;
- d. Setelah mendapat pertimbangan dari Kepala DISPENDA, berkas keberatan WP disertai pertimbangan Kepala DISPENDA kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan terhadap keberatan yang di ajukan oleh WP tersebut.  
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan  
Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu 12 (duabelas) bulan telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan;
- e. Apabila permohonan keberatan tidak di setujui, Seksi Pendaftaran dan Pendataan membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan. Sedangkan apabila di setujui, Seksi Pendaftaran dan Pendataan membuat Surat Keputusan Keberatan;
- f. Kedua Surat Keputusan tersebut di tandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Surat Keputusan Penolakan Keberatan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli untuk WP dan arsip sedangkan Surat Keputusan Keberatan dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu asli untuk WP, satu untuk arsip dan satu tembusan untuk Seksi Penetapan dan Penagihan;

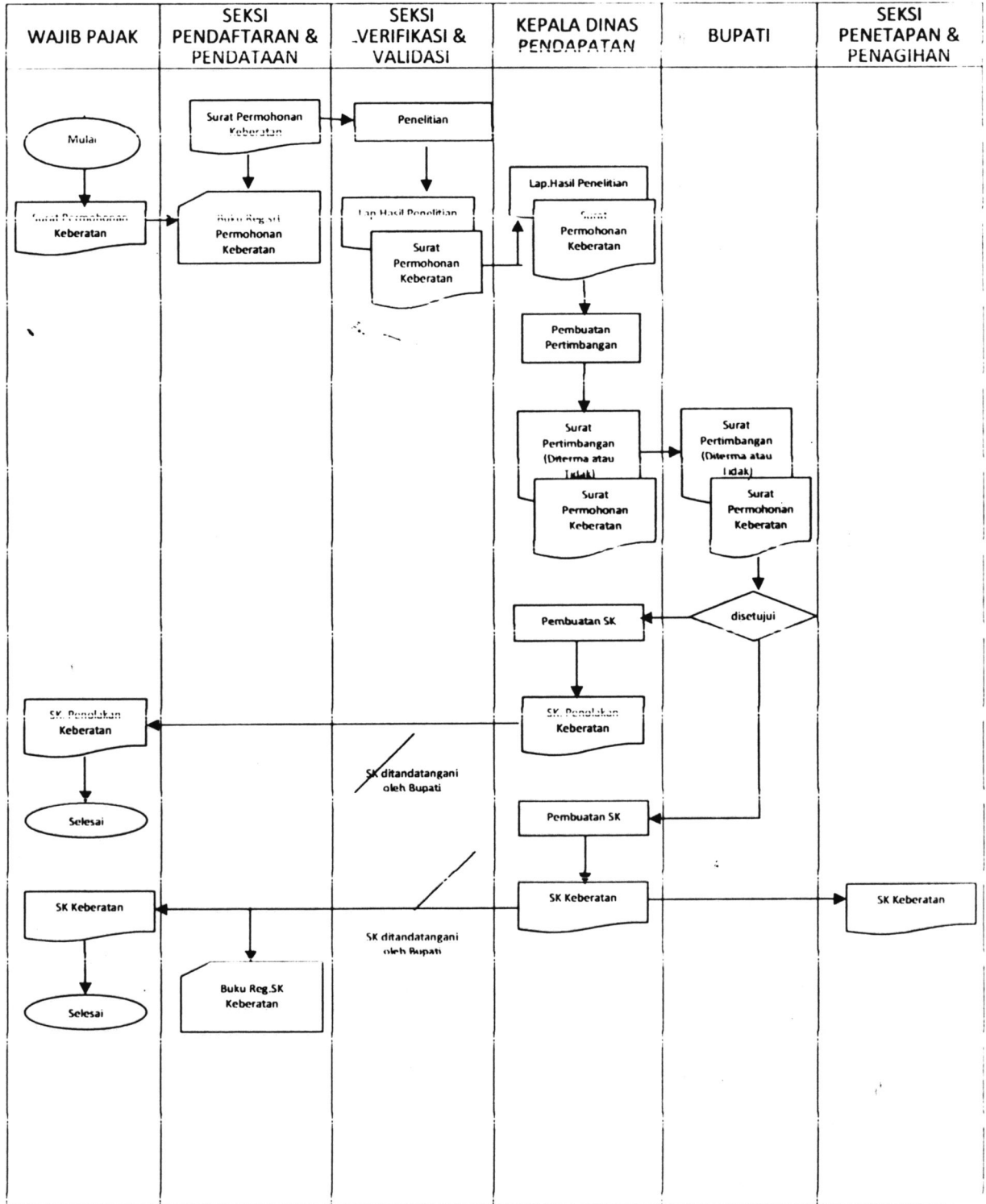
- g. Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dicatat dalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Seksi Pendaftaran dan Pendataan mendistribusikan Surat Keputusan, asli kepada WP dan tembusan kepada pihak yang terkait.

4) Formulir dan Daftar/Buku yang Di gunakan

Formulir dan daftar/buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Laporan Hasil Penelitian Kembali (DPD-25);
- b. Surat Keputusan Penolakan Keberatan (DPD-28);
- c. Surat Keputusan Keberatan(DPD-27);
- d. SKPDLB(DPD-10i);
- e. Buku Register Surat Permohonan Keberatan (BK-25);
- f. Buku Register Surat Keputusan Keberatan (BK-26).

5) Bagan Alur



## 2. Kegiatan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterimakan di lampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan sebulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% perbulan untuk paling lama 24 (duapuluhempat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, kecuali wajib pajak mengajukan banding.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## G. PENAGIHAN

Penagihan pajak dilakukan apabila sampai batas waktu yang ditentukan WP belum melakukan kewajibannya. Proses penagihan dalam sistem administrasi pajak meliputi beberapa kegiatan yaitu: penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dilanjutkan dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang atau pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang bila WP beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya yang tertunda. Kegiatan penagihan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

## 1. Kegiatan Penagihan dengan Surat Teguran

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan penagihan kepada wajib pajak atas ketetapan pajak daerah yang sudah jatuh tempo tetapi belum ada pembayaran.

### 2) Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Wajib Pajak;
- b. Bidang Pajak Daerah - Seksi Penetapan dan Penagihan;
- c. Juru Sita;
- d. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- e. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. Bupati.

### 3) Prosedur

Berdasarkan tunggakan per WP, Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan pengolahan data Wajib Pajak yang telah 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran tapi belum ada pembayaran dan membuat Surat Teguran.

Surat Teguran dibuat rangkap (tiga) dengan distribusi:

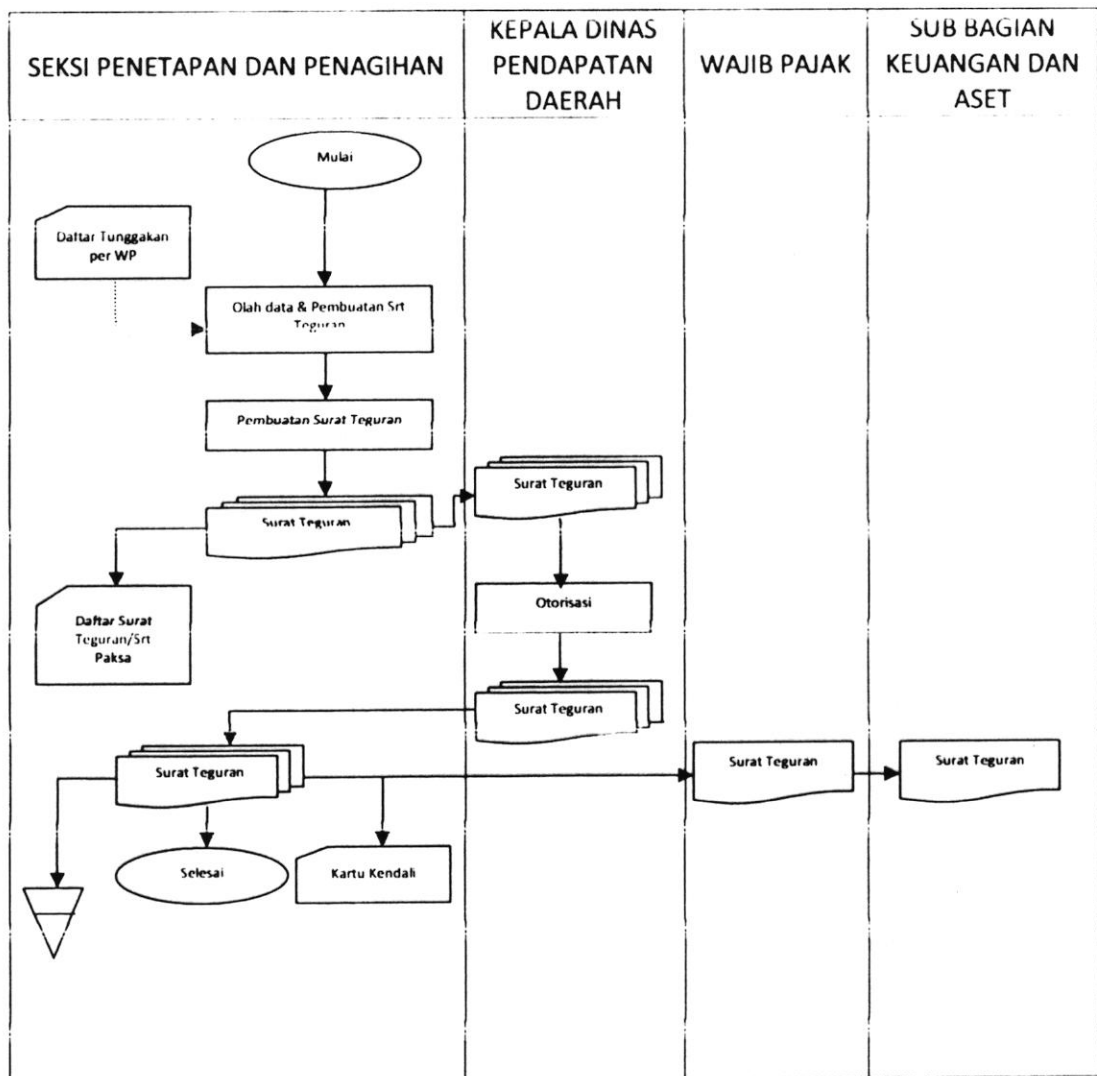
- (1) Asli untuk Wajib Pajak;
- (2) Satu tembusan untuk Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (3) Arsip.
  - a. Berdasarkan Surat Teguran, Seksi Penetapan dan Penagihan mencatat dalam Daftar Surat Teguran / Surat Paksa;
  - b. Selanjutnya Surat Teguran disampaikan ke Kepala DISPENDA untuk di otorisasi dan mencatatnya dalam Kartu Kendali;
  - c. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan Surat Teguran kepada WP dan pihak yang terkait.

4) Formulir dan Daftar /Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain.

- a. Surat Teguran
- b. Daftar Surat Ketetapan
- c. Buku Penerimaan dan Penyetoran
- d. Buku Register SK Keberatan
- e. Daftar Surat Teguran/ Surat Paksa
- f. Buku Kendali

5) Bagan Alur



## 2. Kegiatan Penagihan Dengan Surat Paksa

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penagihan utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada wajib pajak.

### 2) Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- b. Kepala DISPENDA;
- c. Wajib Pajak;
- d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan Daftar Surat Teguran/Surat Paksa, Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan pengolahan data untuk WP yang setelah lewat waktu 21 (duapuluhsatu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Pajak terutang dan di lanjutkan dengan pembuatan Surat Paksa. Surat Paksa dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:

- (1) Asli untuk Wajib Pajak;
- (2) Satu tembusan untuk Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (3) Arsip.

- b. Berdasarkan Surat Paksa, Seksi Penetapan dan Penagihan mencatat dalam Daftar Surat Teguran /Surat Paksa;
- c. Selanjutnya Surat Paksa di sampaikan ke Kepala DISPENDA untuk di otorisasi dan mencatatnya dalam Kartu Kendali;
- d. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan Surat Paksa kepada WP dan pihak yang terkait. Penyerahan Surat Paksa kepada WP yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak.

### 4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

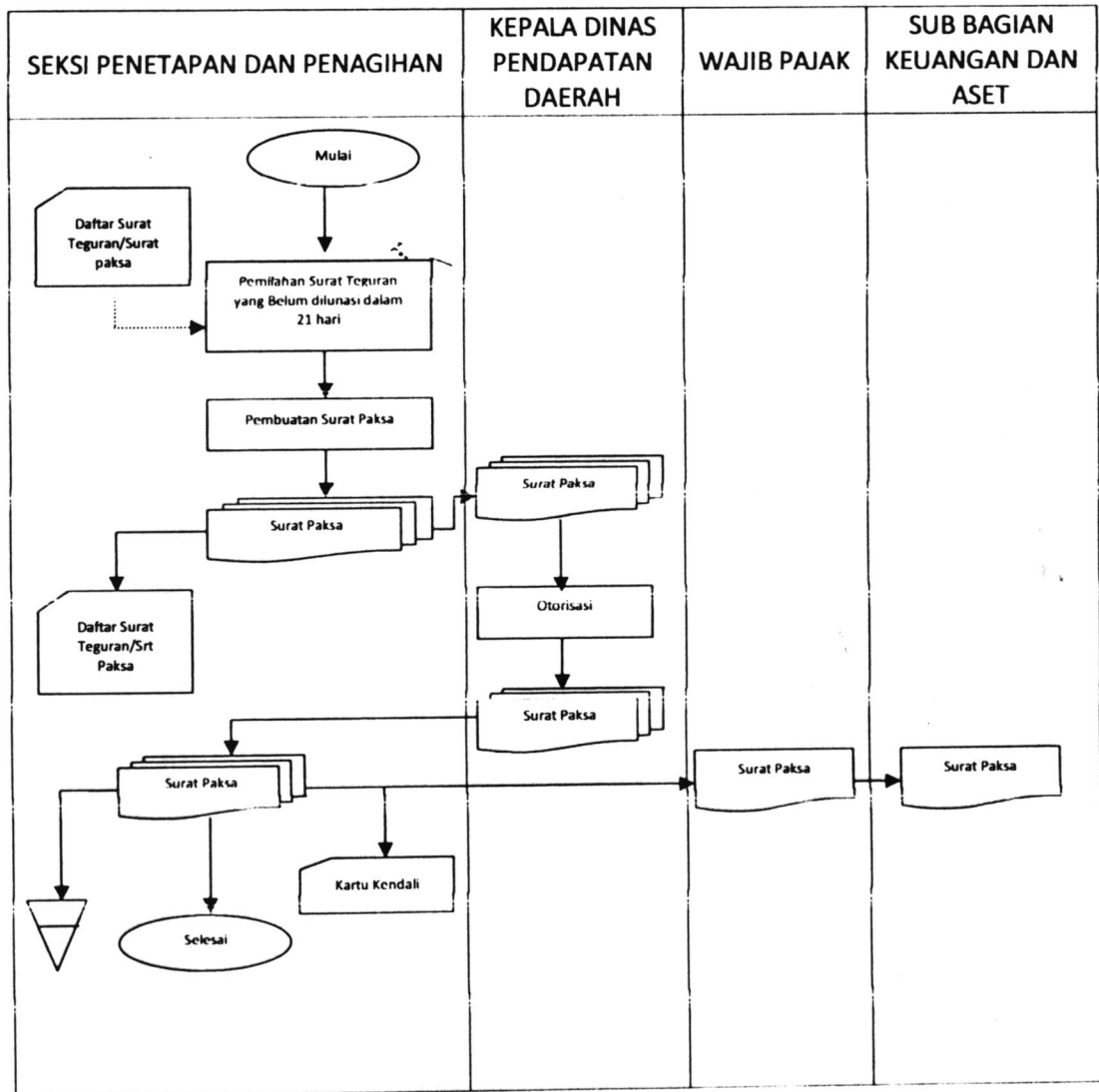
Formulir dan daftar /buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain.

- a. Surat Paksa



- b. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
- c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
- d. Daftar Surat Teguran/Surat Paksa

5) Bagan Alur



### 3. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

#### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penagihan dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Hal ini dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah diberikan Surat Paksa.

#### 2) Pihak-pihak yang Terkait

*Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:*

- a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- b. Kepala DISPENDA,
- c. Juru Sita Pajak;
- d. Wajib Pajak.

#### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan daftar surat teguran /surat paksa, Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan pengolahan data untuk WP yang belum melunasi hutang Pajaknya 2 X 24 Jam (duahari) setelah tanggal Surat Paksa dan pembuatan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
  - (1) Asli untuk wajib pajak
  - (2) Tembusan untuk juru sita pajak
  - (3) Arsip
- b. Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Seksi Penetapan dan Penagihan mencatat dalam Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- c. Selanjutnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan ke Kepala DISPENDA untuk diotorisasi dan setelah itu mencatatnya kedalam Kartu Kendali.
- d. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pihak yang terkait;
- e. Atas dasar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan dengan menyegel barang milik WP yang boleh disita menurut Perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- f. Berdasarkan BAP Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak membuat Laporan Pelaksanaan

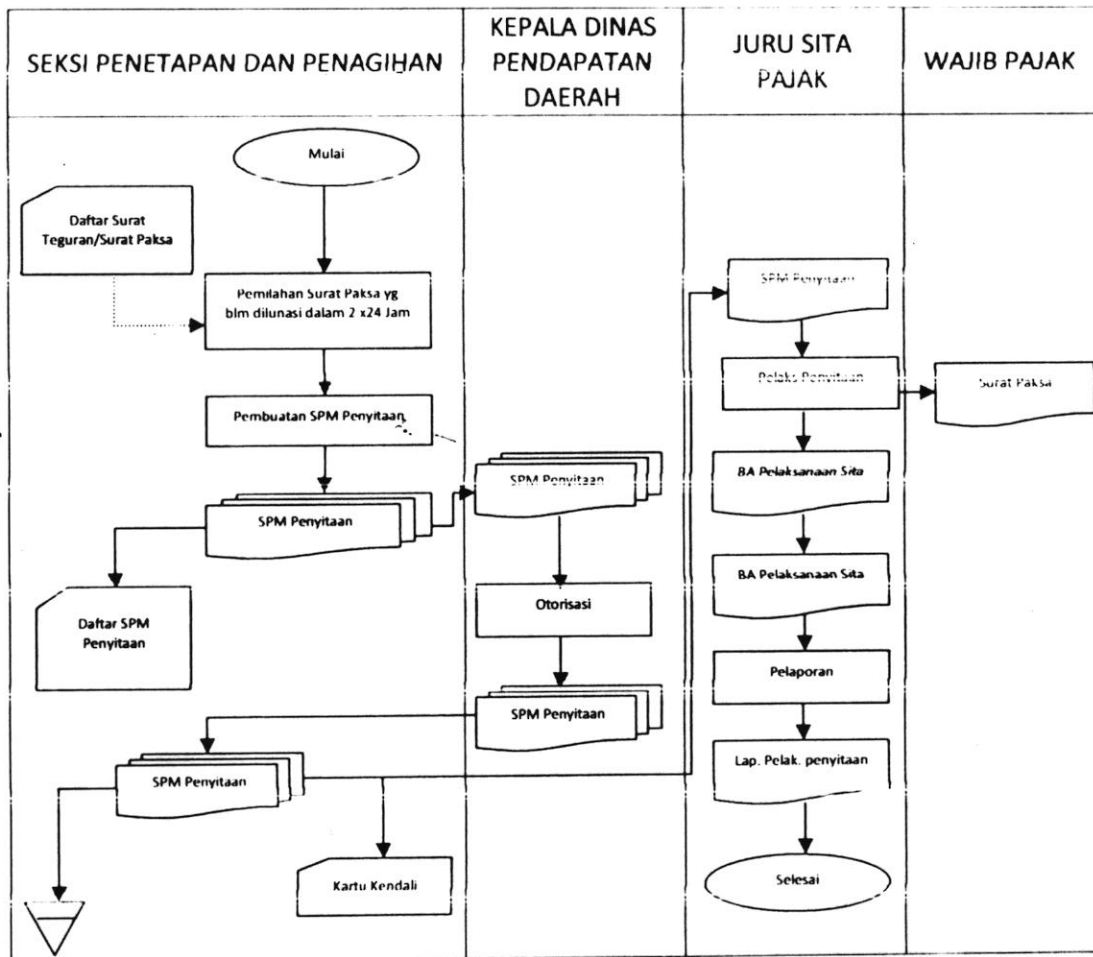
Penyitaan dengan diketahui oleh Kepala DISPENDA

4) Formulir dan Daftar /Buku yang Di gunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- b. Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. Laporan Pelaksanaan Penyitaan
- d. Daftar Surat Ketetapan
- e. Buku Penerimaan danPenyetoran
- f. Buku Kendali
- g. Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

5) Bagan Alur



4. Kegiatan Pengumumandan Pelaksanaan Lelang

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengumumkan dan pelaksanaan lelang atas barang yang disita untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak.

2) Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a. Seksi Penagihan,

Penagihan melakukan pengolahan data dan membuat Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP yang belum melunasi hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi : asli untuk BUPLN/KPKNL dan tembusan untuk arsip;

b. Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang disampaikan kepada Kepala DISPENDA untuk diotorisasi dan selanjutnya di catat ke dalam Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang;

c. Seksi Penagihan mendistribusikan Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang ke BUPLN/KPKNL;

d. Memeriksa hari tanggal dan jam pelelangan yang di setujui oleh Kepala DISPENDA dan Penyiapan berkas penyitaan WP yang akan di lelang.

e. Setelah berkas penyitaan WP lengkap dan waktu sudah mendapat persetujuan dari Kepala DISPENDA, menyampaikan permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (BUPLN/KPKNL);

f. Berdasarkan Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang dan berkas penyitaan WP yang bersangkutan, BUPLN/KPKNL melaksanakan Pengumuman Lelang;

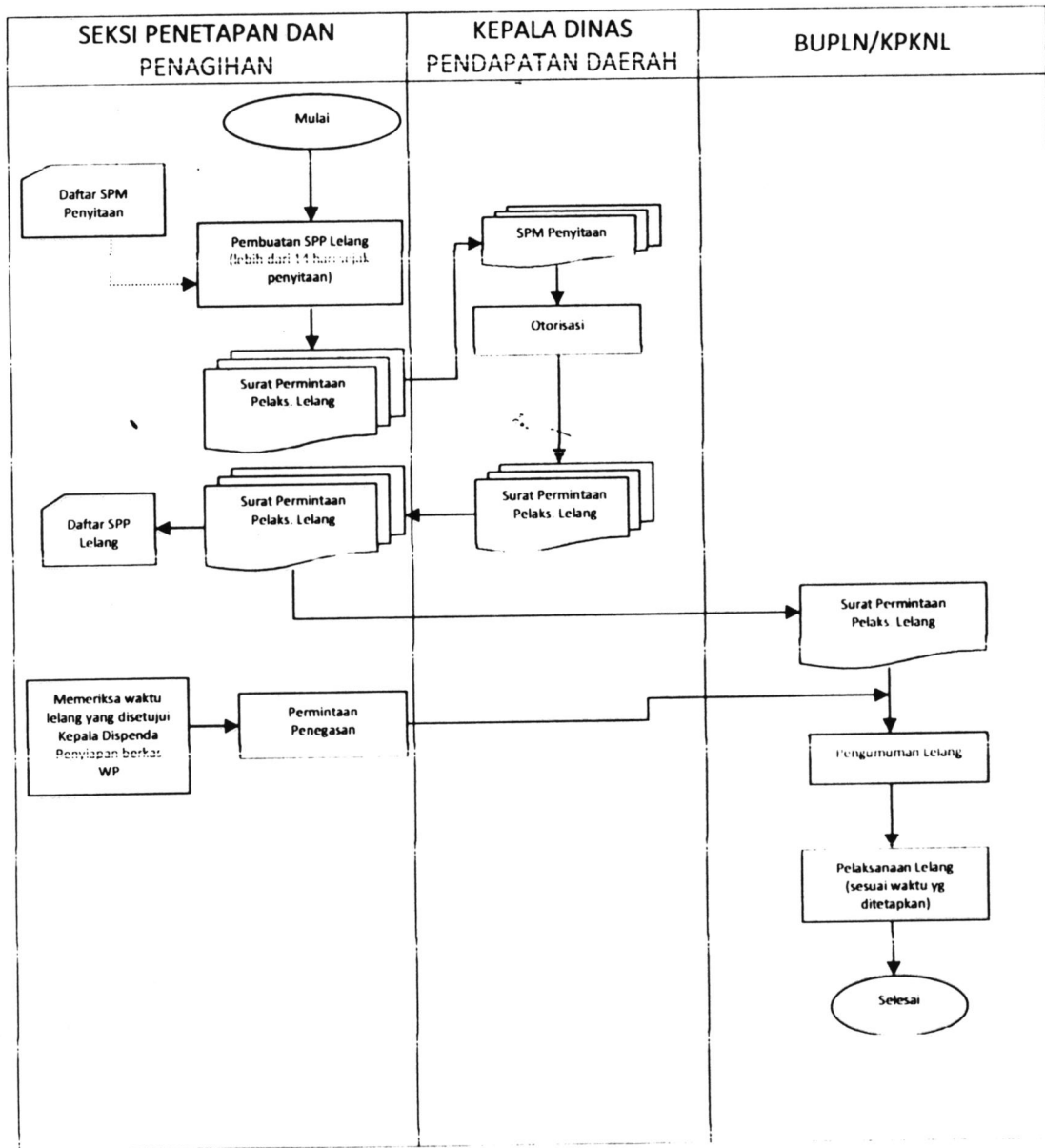
g. BUPLN/KPKNL melaksanakan Lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang telah di tentukan.

4) Formulir dan Daftar /Buku yang Di gunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan antara lain.

- a. Formulir Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang
- b. Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- c. Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang

5) Bagan Alur



## 5. Kegiatan Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam rangka mencabut kembali langkah penagihan dengan penyitaan dan pengumuman pelelangan karena wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang.

### 2) Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- b. Juru Sita Pajak;
- c. BUPLN/KPKNL.

### 3) Prosedur

- a. Berdasarkan buku pembantu penerimaan perjenis, Seksi Penetapan dan Penagihan mengolah data dan membuat surat pencabutan penyitaan untuk WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman lelang. Surat Pencabutan Penyitaan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
  - (1) Asli untuk wajib pajak
  - (2) Tembusan untuk juru sita pajak
  - (3) Arsip
- b. Seksi Penagihan menyampaikan surat pencabutan penyitaan kepada Kepala DISPENDA untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat Pencabutan Penyitaan;
- c. Setelah dicatat, Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan surat pencabutan tersebut yaitu asli untuk wajib pajak dan tembusan untuk Juru Sita Pajak dan arsip;
- d. Berdasarkan tembusan surat pencabutan penyitaan, Juru Sita Pajak melaksanakan pencabutan penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan;

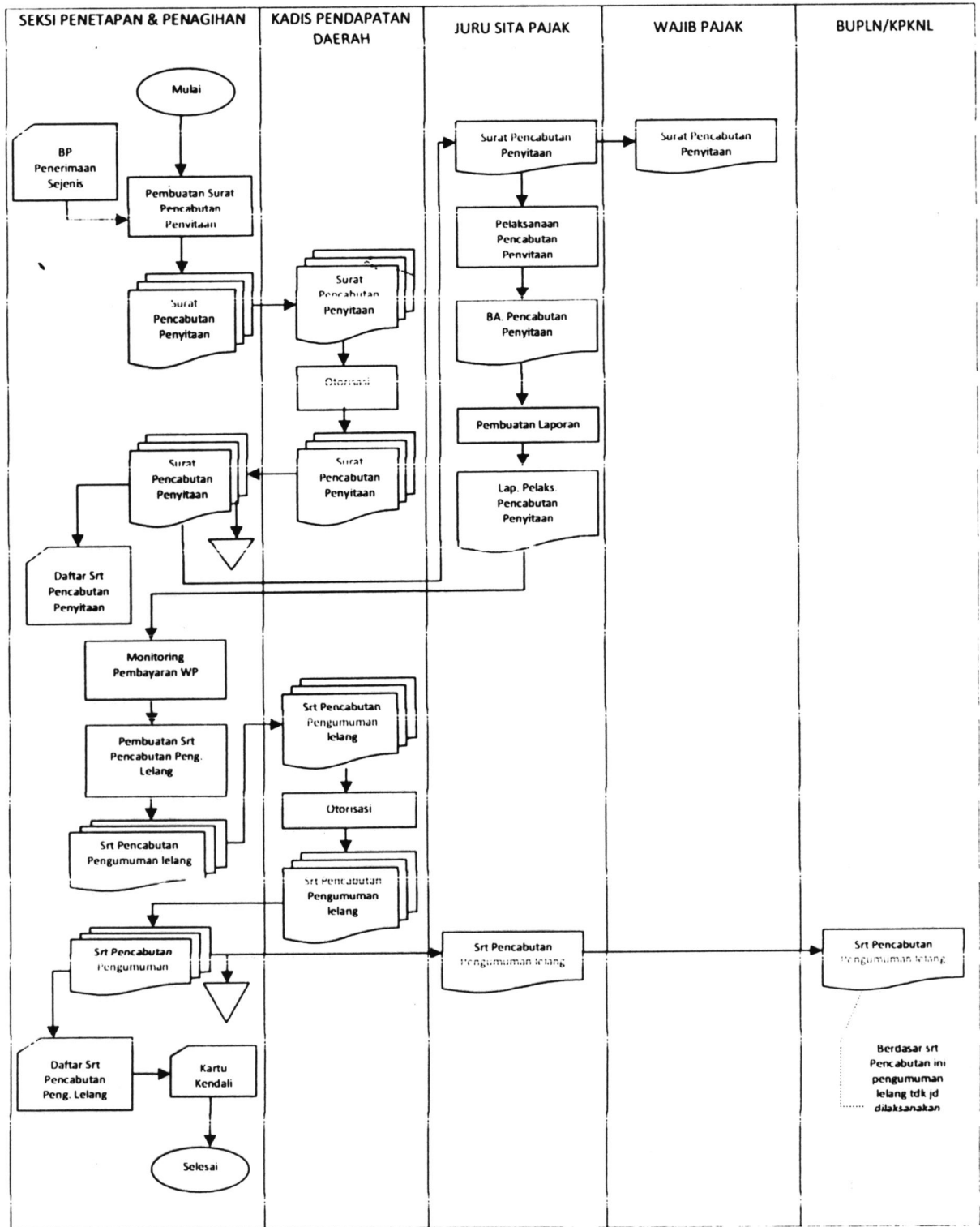


- e. Selanjutnya membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan diketahui oleh Kepala DISPENDA ; Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan monitoring penyetoran WP seperti huruf a diatas untuk mengetahui WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;
  - f. Berdasarkan pengolahan data pada huruf, Seksi Penetapan dan Penagihan membuat surat pencabutan pengumuman lelang untuk WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang. Surat Pencabutan Pengumuman Lelang dibuat rangkap3 (tiga) dengan distribusi:
    - (1) Asli untuk BUPLN/KPKNL
    - (2) Tembusan untuk juru sita pajak
    - (3) Arsip
  - g. Seksi Penetapan dan Penagihan menyampaikan surat pencabutan pengumuman lelang kepada Kepala DISPENDA untuk diotorisasi ,selanjutnya dicatat ke dalam Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang dan Kartu Kendali;
  - h. Setelah di catat, Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan surat pencabutan tersebut melalui Juru Sita Pajak, yaitu: asli untuk BUPLN/KPKNL dan tembusan untuk Juru Sita Pajak dan arsip;
  - i. Berdasarkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang, BUPLN/KPKNL membatalkan pengumuman lelang yang sudah dilakukan.
- 4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan
- Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:
- a. Surat Pencabutan Penyitaan
  - b. Surat Pencabutan Pengumuman Lelang
  - c. Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
  - d. Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
  - e. Daftar Surat Ketetapan
  - f. Buku Penerimaan dan Penyetoran
  - g. Buku Kendali

h. Daftar Sura (Pencabutan Penyitaan

i. Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang

5) Bagan Alur



## 6. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

### 1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penagihan atas utang pajak yang belum di setor oleh wajib pajak. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### 2) Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:

- a. Seksi Penetapan dan Penagihan,
- b. Juru Sita Pajak;
- c. Wajib Pajak;
- d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3) Prosedur

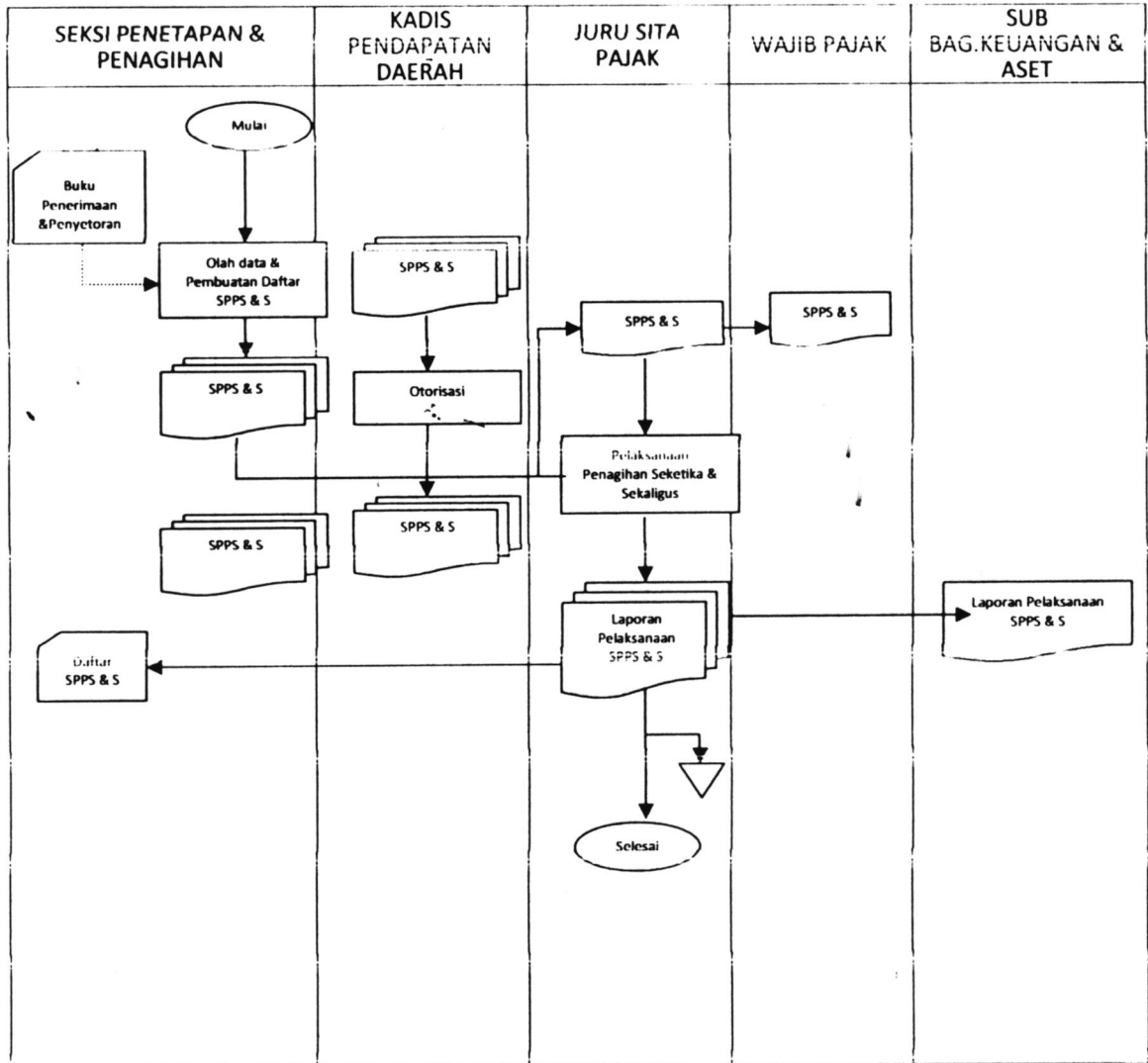
- a. Berdasarkan buku pembantu penerimaan sejenis, Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan pengolahan data dan membuat Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S) untuk WP yang belum menyetor SPPS dan di buat rangkap 3(tiga) dengan distribusi:
  - (1) Asli untuk waj b pajak;
  - (2) Tembusan untuk Juru Sita Pajak;
  - (3) Arsip
- b. Seksi Penetapan dan Penagihan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus(SPPS&S) kepada Kepala DISPENDA untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S);
- c. Setelah dicatat, Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S) tersebut, yaitu asli untuk Wajib Pajak dan tembusan untuk Juru Sita Pajak dan arsip;
- d. Berdasarkan tembusan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S), Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan;
- e. Selanjutnya membuat laporan pelaksanaan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dengan diketahui oleh Kepala DISPENDA .Laporan dibuat rangkap 3(tiga) dengan distribusi sebagai berikut:
  - (1) Seksi Penetapan dan Penagihan;
  - (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - (3) Arsip
- f. Setelah di tandatangani Kepala DISPENDA, Juru Sita Pajak mendistribusikan kepada pihak yang terkait.

4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain.

- a. Surat Perintah Penagihan Sekaligus dan Seketika
- b. Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- c. Buku Penerimaan dan Penyetoran;
- d. Daftar SPPS & S

5) Bagam/Alur



## **H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI**

Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan /atau kesalahan hitung dan /atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya.

### **1. Pengertian**

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

### **2. Pihak-pihak yang Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. **Wajib Pajak;**
- b. Seksi Verifikasi dan Validasi,
- c. **Kepala DISPENDA;**
- d. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- e. **Sub Bagian Keuangan dan Aset.**

### **3. Prosedur**

- a. Fungsi Keberatan menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari WP dan mencatatnya ke dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- b. Meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi WP, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian;
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala DISPENDA untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.

Apabila permohonan ditolak, Fungsi Keberatan membuat Surat Keputusan Penolakan Pembetulan rangkap 4 (empat) dengan distribusi: Asli untuk wajib pajak, tembusan masing-masing untuk Seksi Pendaftaran dan Pendataan dan Seksi Penetapan dan Penagihan serta arsip;

Apabila permohonan diterima, Fungsi Keberatan membuat Surat Keputusan Pembetulan rangkap 4 (empat) dengan distribusi: Asli untuk wajib pajak, tembusan masing-masing untuk Seksi Pendaftaran dan Pendataan dan Seksi Penetapan dan Penagihan serta arsip.

- e. Menyampaikan Surat Keputusan yang telah disetujui oleh Kepala DISPENDA kepada Bupati untuk diotorisasi.
- f. Setelah surat keputusan diotorisasi, Fungsi Keberatan mencatat Surat Keputusan Penolakan kedalam Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan dan mencatat Surat Keputusan Pembetulan kedalam Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Selanjutnya Surat Keputusan didistribusikan kepada WP dengan tembusan kepada pihak-pihak yang terkait.

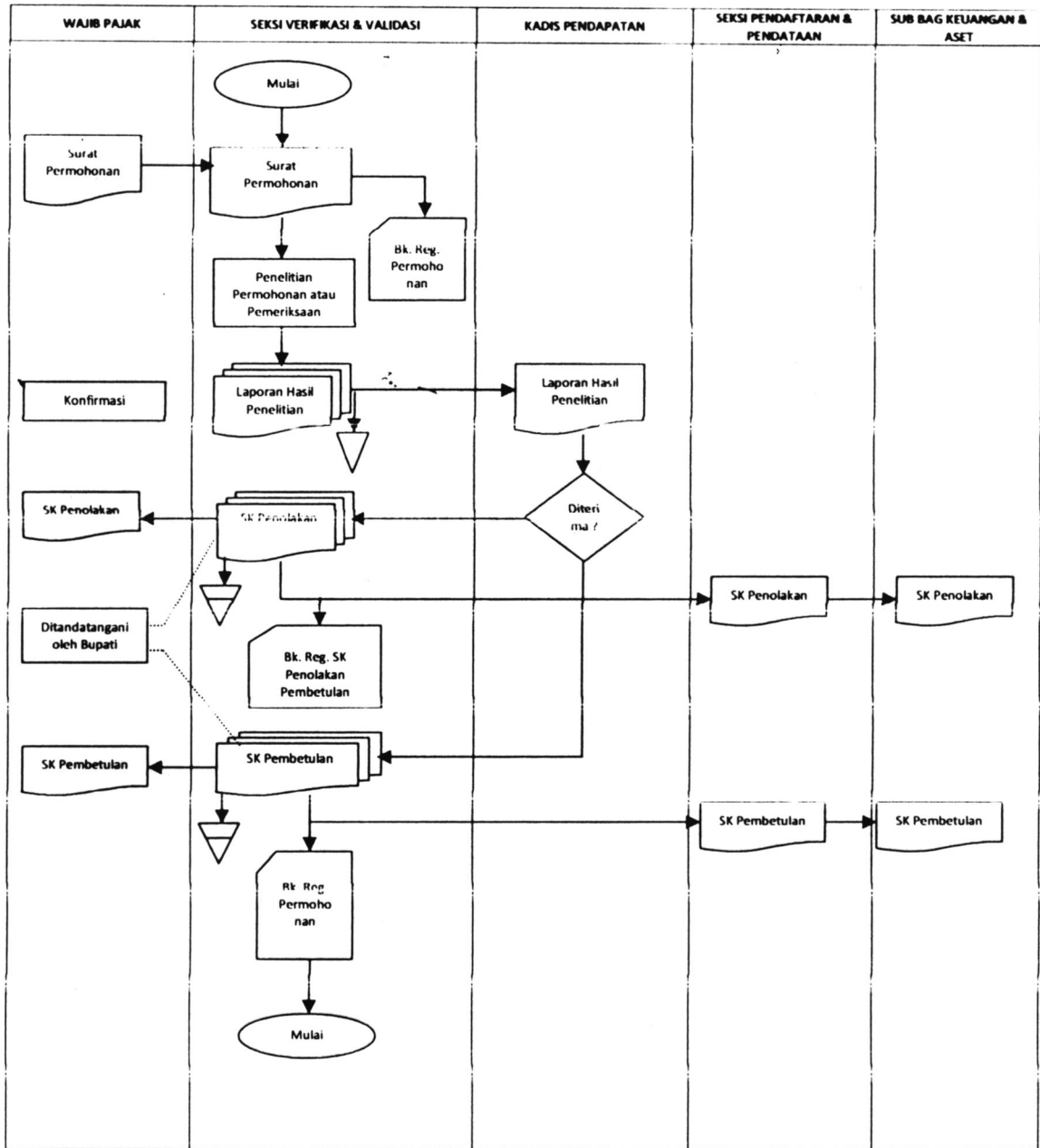
#### 4. Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. SKPD
- b. SKPDN
- c. SKPDKB
- d. STPDKBT
- e. STPD
- f. Surat Permohonan Pembetulan
- g. Laporan Hasil Penelitian;
- h. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan
- i. Surat Keputusan Pembetulan
- j. SKPDLB
- k. Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
- l. Buku Register Surat Keputusan Pembetulan
- m. Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan



## 5. Bagan Alur



## I. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dan Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan harus memberikan keputusan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Apabila jangka waktu 12 (duabelas) bulan telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sebulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dan apabila dilakukan lebih lama, Bupati memberikan imbalan Bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

### 1. Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permohonan pengembalian kelebihan pembayaran oleh wajib pajak dan penerbitan SKPDLB serta penerbitan SPMKPD sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

### 2. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Wajib Pajak;
- b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Kepala Bidang Pajak Daerah;
- d. Bupati;
- e. Seksi Penetapan dan Penagihan
- f. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. BUD/Kuasa BUD.

### 3. Prosedur

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Pemeriksaan.
- b. Laporan Pemeriksaan di tandatangi oleh Petugas dan dimintakan konfirmasi kepada WP dan apabila telah disetujui WP ikut menandatangani laporan pemeriksaan .
- c. Mencatat data perpajakan ke dalam Kartu Data, selanjutnya diserahkan kepada petugas yang melakukan penghitungan untuk dilakukan penghitungan penelapan kelebihan pembayaran pajak; berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan pajak yang lain dan kemudian dibuat Nota Perhitungan;
- d. Setelah di perhitungkan dengan hutang Pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran Pajak kurang/ sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka WP menerima Bukti Pemindah bukuan, sebagai Bukti Pembayaran /Kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud ,karenanya SKPDLB tidak di terbitkan;
- e. Bukti Pemindah bukuan dibuat rangkap 3(tiga) dengan distribusi: asli untuk wajib pajak,tembusan masing-masing untuk Sub Bagian Keuangan dan Aset dan arsip.
- f. Setelah d setujui oleh oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan selanjutnya Bukti Pemindah bukuan di distribusikan kepihak yang terkait.
- g. Apabila setelah diperhitungkan /dikompensasikan dengan ternyata kelebiha pembayaran Pajak ternyata lebih besar dibandingkan dengan hutang Pajak, maka WP akan menerima Bukti Pemindah bukuan dan sebagai bukti pembayaran /kompensasi dan diterbitkan SKPDLB. SKPDLB dibuat rangkap 3(tiga) dengan distribusi :asli untuk wajib pajak,tembusan untuk Seksi Penetapan dan Penagihan serta satu tembusan untuk arsip.
- h. Seksi Pendaftaran dan Pendataa nmenyampaikan SKPDLB ke Kepala Bidang Pajak Daerah untuk di torisasi atas nama Bupati selanjutnya di distribusikan kepada pihak yang terkait.
- i. Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. SPMKPD di buat rangkap 3(tiga) dengan distribusi: asli untuk BUD/KuasaBUD ,satu tembusan untuk Kepala DISPENDa,dan satu tembusan untuk arsip.

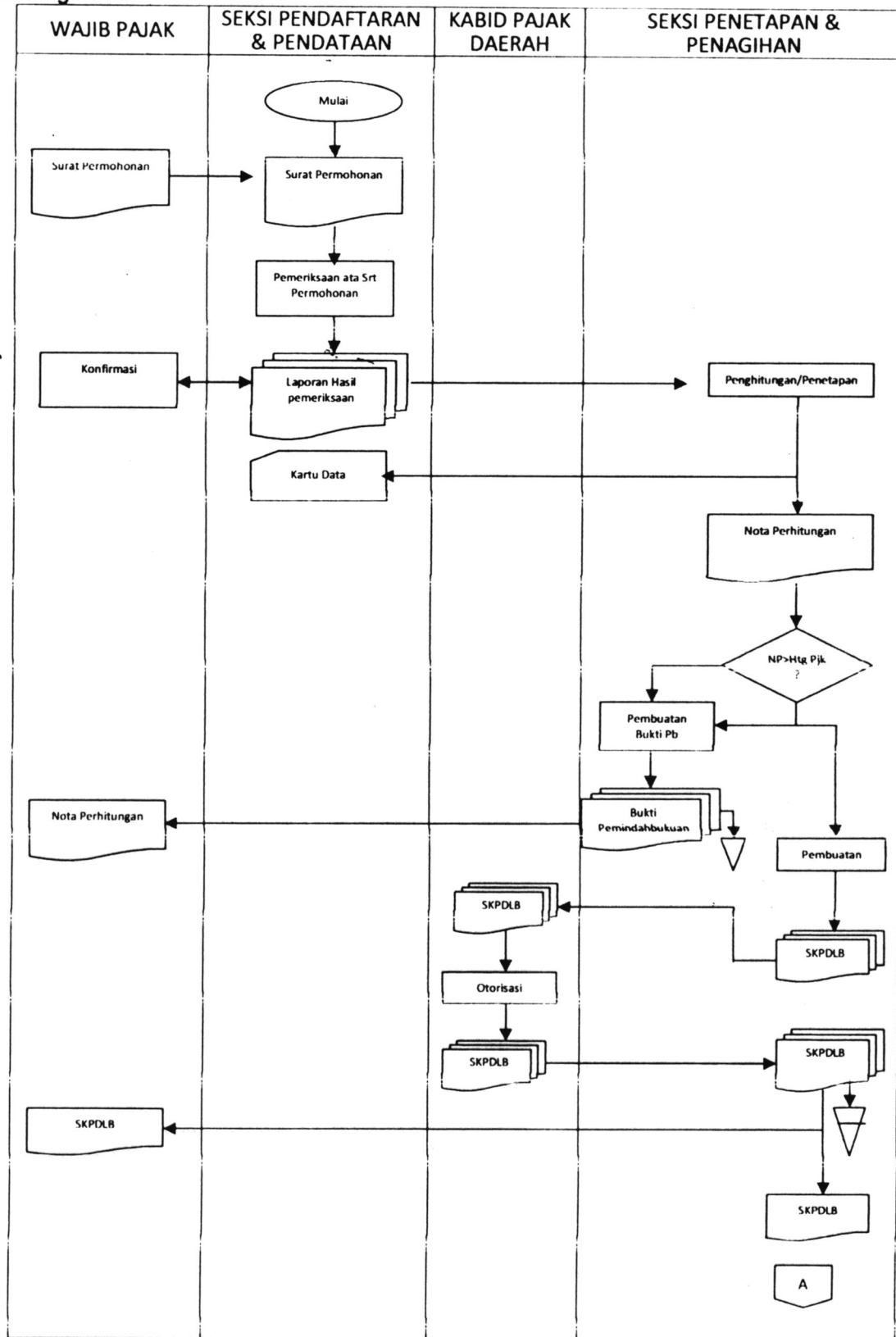
- j. SPMKPD selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk diotorisasi untuk kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait;
- k. BUD/Kuasa BUD, berdasarkan SPMKPD memproses penerbitan SP2D untuk mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak kepada wajib pajak. SP2D buat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:
  - 1) Asli untuk wajib pajak;
  - 2) Tembusan masing-masing untuk Bank tempat menyimpan kas daerah dan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3) Arsip.
- l. Setelah SP2D ditandatangani, BUD /Kuasa BUD mendistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait.

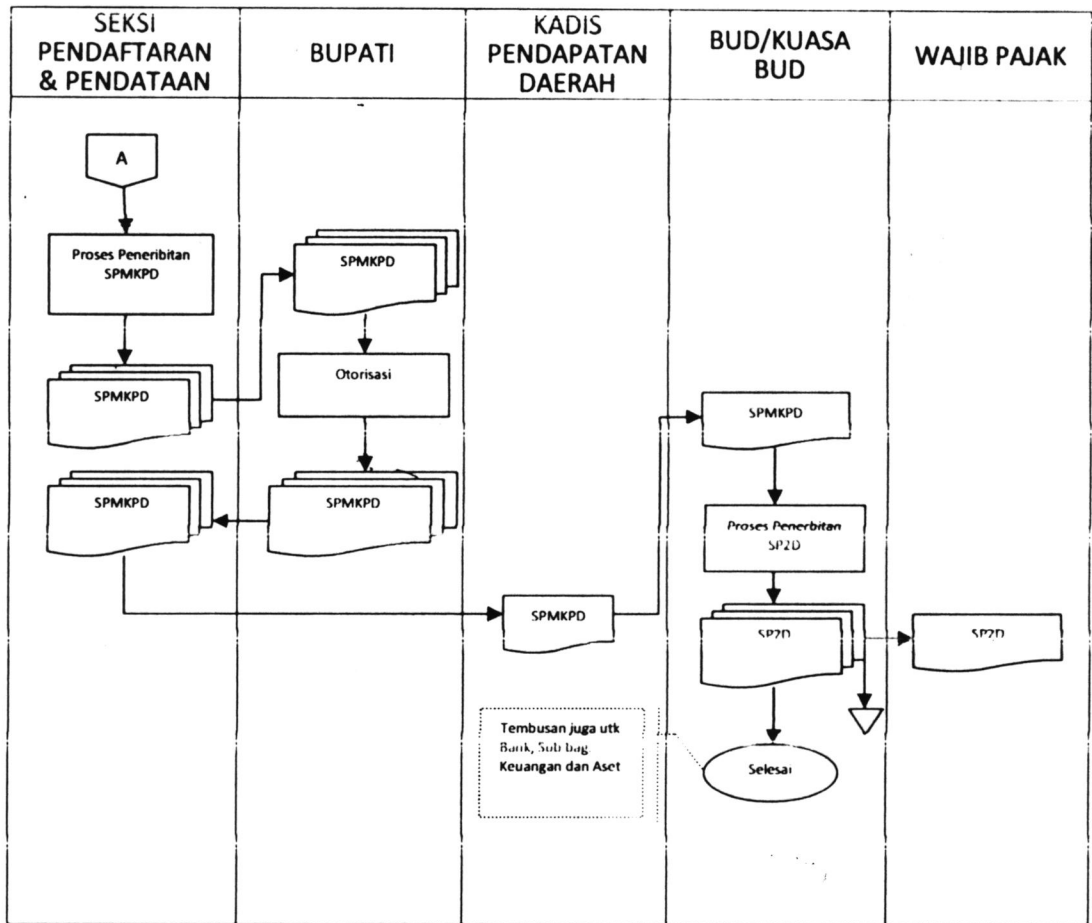
4. Formulir dan Daftar/Buku yang Di gunakan

Formulir dan daftar/ buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

- a. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (SPPKPPD);
- b. SKPDLB;
- c. SPMKPD;
- d. Bukti Pemindah bukuan;
- e. Daftar Surat Ketetapan;
- f. Daftar SPMKPD.

5. Bagan Alur





PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN KEPEGDA	
KADIS HUBKOMINFO	
KADIS PORABUDPAR	
KADIS DIK	
KADIS PENDAPATAN	<i>[Signature]</i>
KASAG KUMDANG	<i>[Signature]</i>

BUPATI PARIGI MOUTONG,

*[Signature]*

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU